

# Laporan Kinerja

**BPMP PROVINSI SUMATERA UTARA** 



Jl. Bunga Raya No. 96, Asam Kumbang, Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara 20135.









## Kata

## Pengantar

Puii syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya BPMP Provinsi Sumatera Utara berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kineria tahun 2024 dengan tepat Berdasarkan Peraturan waktu. Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Instansi Pemerintah Kineria Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap mengamanatkan kepada instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi sumatera sasaran. atas pencapaian kegiatan beserta indikator kinerjanya dalam tertuana sebagaimana **BPMP** Kinerja Provinsi Perjanjian Sumatera Utara tahun 2024. BPMP Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024 menetapkan 2 sasaran dan 4 indikator kinerja. Secara umum BPMP Provinsi Sumatera Utara telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan BPMP Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja BPMP Provinsi Sumatera Utara.

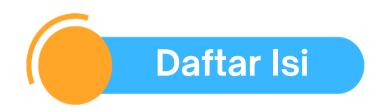
Medan, 80 Januari 2024

MUTU PENDIDIKAN PROVINSI

Tajodon Idris, S.Si., M.T.



H. Tajuddin Idris, S.Si., M.T Kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara



Kata Pengantar	Ì
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	iv
Daftar Gambar	٧
Ikhtisar Eksekutif	vi
BAB I Pendahuluan	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	4
C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi	5
D. Isu-isu Strategis	6
BAB II Perencanaan Kinerja	8
A. Rencana Strategis	8
B. Tujuan Strategis	9
C. Program Prioritas 2024	10
D. Rencana Kerja dan Anggaran	11
E. Perjanjian Kinerja	11
BAB III Akuntabilitas Kinerja	16
A. Capaian Kinerja	16
B. Realisasi Program/Agenda Prioritas	65
C. Realisasi Anggaran	74
D. Kinerja Lain-lain	76
BAB IV Penutup	94
Lampiran	

## **Daftar Tabel**

Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan BPMP Provinsi Sumatera Utara	10
Tabel 2.2 Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2024	11
Tabel 2.3 Matriks perjanjian kinerja dan renstra satker 2020-2024	12
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Awal)	13
Tabel 2.5 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 (Awal)	13
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Revisi)	14
Tabel 2.7 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 (Revisi)	14
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2024	16
Tabel 3.2 Capaian Kinerja IKK 1.1 2020-2021	17
Tabel 3.3 Capaian Kinerja IKK 1.2 Tahun 2020-2021	18
Tabel 3.4 Capaian Kinerja IKK 1.3 Tahun 2020-2021	18
Tabel 3.5 Capaian Kinerja IKK 1.1 Tahun 2022-2024	19
Tabel 3.6 Capaian Kinerja IKK 1.2 Tahun 2022-2024	20
Tabel 3.7 Capaian KInerja Berdasarkan IKK 1.1	21
Tabel 3.8 Capaian Kinerja Berdasarkan IKK 1.2	22
Tabel 3.9 Sebaran satuan pendidikan pelaksana AN dan Sulingjar	34
Tabel 3.10 Progres Login Rapor Pendidikan	45
Tabel 3.11 Progres unduh rapor pendidikan tahun 2024	48
Tabel 3.12 Capaian Target PDM 04A	51
Tabel 3.13 Capaian Kinerja berdasarkan IKK 2.1	59
Tabel 3.14 Capaian Kinerja Anggaran	61
Tabel 3.15 Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2020-2024	64
Tabel 3.16 Program dan Kegiatan	66
Tabel 3.17 Realisasi Anggaran per Program Tahun 2024	74
Tabel 3.18 Enam Area Perubahan	77
Tabel 3.19 Matriks pelaksanaan kerja sama/kemitraan	89

## **Daftar Grafik**

Grafik 2.1	Tren Alokasi Anggaran Tahun 2020-2024	11
Grafik 3.1	Tren capaian kinerja tahun 2020-2021 (IKK 1.1)	23
Grafik 3.2	Tren capaian kinerja tahun 2020-2021 (IKK 1.2)	23
Grafik 3.3	Tren capaian kinerja tahun 2020-2021 (IKK 1.3)	24
Grafik 3.4	Tren capaian kinerja tahun 2022-2024 (IKK 1.1)	25
Grafik 3.5	Tren capaian kinerja tahun 2022-2024 (IKK 1.2)	26
Grafik 3.6	Sebaran Jumlah Sekolah Pelaksana IKM	28
Grafik 3.7	Data Satuan Pendidikan yang tidak mengikuti ANA	35
Grafik 3.8	Data Satuan Pendidikan tidak mengikuti Sulingjar	36
Grafik 3.9	Data Satuan Pendidikan Mengikuti AN Tidak Memadai	37
Grafik 3.10	Mengikuti Sulingjar Tapi Tidak Memadai	38
Grafik 3.11	Data Sekolah PSP berdasar angkatan dan jenjang	40
Grafik 3.12	Data SP di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	41
Grafik 3.13	Perbandingan Jumlah Sekolah PSP dan IKM	42
Grafik 3.14	Progres Rapor Pendidikan	46
Grafik 3.15	Progres unduh rapor pendidikan tahun 2024	48
Grafik 3.16	Capaian Peringkat SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Utara	60
Grafik 3.17	Capaian Kinerja Anggaran	62
Grafik 3.18	Tren Capaian IKK 2.1	64
Grafik 3.19	Tren Capaian Kineria IKK 2.2	65

## **Daftar Gambar**

Gambar 1.1	Linimasa Perubahan Nomenklatur	1
Gambar 1.2	Data SDM BPMP Provinsi Sumatera Utara	2
Gambar 1.3	Data PPNPN BPMP Provinsi Sumatera Utara	3
Gambar 1.4	Beban Kerja BPMP Provinsi Sumatera Utara	3
Gambar 1.5	Struktur Organisasi BPMP Provinsi Sumatera Utara	6
Gambar 3.1	Statistik Tipe sekolah Pengguna PMM	30
Gambar 3.2	Statistik Status Penggunaan PMM	31
Gambar 3.3	Capaian IKK 2.2	62
Gambar 3.4	Efisiensi Anggaran Tahun 2024	75
Gambar 3.5	Laman BPMP Provinsi Sumatera Utara	84
Gambar 3.6	Microsite Data	85
Gambar 3.7	Dasbor Rapor Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	85
Gambar 3.8	Microsite Rapor Pendidikan	86
Gambar 3.9	Dasbor komparasi rapor pendidikan satuan Pendidikan	86
Gambar 3.10	Pelaksanaan Festival Literasi Numerasi	87
Gambar 3.11	Piagam Penghargaan dari KPPN Medan 1	88
Gambar 3.12	Piagam Penghargaan dari Mendikbudristek RI	88

## **Ikhtisar**

## **Eksekutif**

Laporan kinerja BPMP Provinsi Sumatera Utara 2024 menyajikan tingkat pencapaian 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024. Tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III.

Secara umum, capaian kinerja selama kurun waktu tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

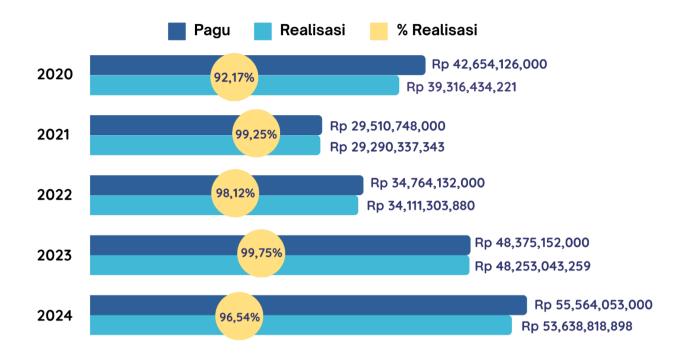
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2	020	2	021
		•		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	[SK 1] Meningkatnya penjaminan mutu Pendidikan di seluruh jenjang	[IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75	%	26.5	24.3	27.4	38.06
	pendidikan	[IKK 1.2] Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	%	5	3.4	5	4.4
		[IKK 1.3] Persentase kabupaten/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	95	97.49	95.2	100
2	[SK 2] Terwujudnya tata Kelola LPMP yang baik	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	Predikat	BB	ВВ	BB	ВВ
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAK/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	Nilai	81	95,43	82	94.66

<sup>\*</sup> Tahun 2020 dan 2021 masih menggunakan rapor mutu satuan pendidikan dari aplikasi Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP)

No	Sasaran	Indikator	Satuan	2	022	2023		2024	
		Kinerja		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	[SK 1] Meningka t-nya mutu pendidika n jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajara nnya	%	0.98	2.12	1.98	1.36	3.92	7.40
		[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang meningkat rapor pendidikann ya (Dikdas dan Dikmen)	%	25	97.1	30	52.94	52.95	100
2	[SK 2] Meningka tnya tata kelola Balai Penjamin an Mutu Pendidika	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	Predikat	А	ВВ	A	A	A	A
	n Sumatera Utara	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAK/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	Nilai	83	97,67	84	94,49	94.50	98,28

<sup>\*</sup> Tahun 2022 sampai dengan 2024 menggunakan rapor pendidikan satuan pendidikan

Berikut tren alokasi anggaran BPMP Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2020-2024:



Berdasarkan dari grafik/tabel di atas, dapat dikatakan bahwa alokasi anggaran selama tahun 2020 hingga 2024 mengalami penurunan dan peningkatan, hal tersebut seiring dengan penurunan dan peningkatan target/sasaran program prioritas Kementerian/Eselon I/Unit Kerja.

Selama tahun 2024, terdapat permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target, antara lain:

- Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, strategi utama BPMP Provinsi Sumatera Utara adalah melaksanakan advokasi kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota/provinsi, namun belum dapat dipastikan apakah informasi yang disampaikan pada saat advokasi tersebut tersosialisasikan ke satuan Pendidikan;
- 2. Belum optimalnya program dan kegiatan BPMP Provinsi Sumatera Utara yang menyentuh Pendidikan Masyarakat (Dikmas);
- 3. Penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan proyeksi yang telah disusun untuk tahun 2024 karena adanya perubahan jadwal kegiatan dan program kegiatan dari tim kerja Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (PDM);
- 4. Kemampuan staf BPMP dalam mengadvokasi daerah masih beragam dan perlu ditingkatkan.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul, antara lain:

- 1. Mengoptimalkan peran widyaprada dan Pengawas Sekolah dalam membina satuan Pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan;
- 2. Membuat program dan kegiatan yang melibatkan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- 3. Mengoptimalkan penyerapan anggaran dan tetap berkoordinasi dengan Tim kerja Pusat terkait pelaksanaan kegiatan.
- 4. Menyelenggaran peningkatan kapasitas SDM melalui rapat rutin, internalisasi, in house training dan pembekalan lainnya guna penyamaan persepsi sebelum pelaksanaan kegiatan.

## **BABI**

## **Pendahuluan**

#### A. Gambaran Umum

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Utara merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.

Sejak tanggal 8 Maret 2024 BPMP Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh Tajuddin Idris, S.Si, M.T. menggantikan Drs. Irwan Safii, M.Pd.

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, maka pada tanggal 8 November 2024 ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Gambar 1.1 Linimasa Perubahan Nomenklatur

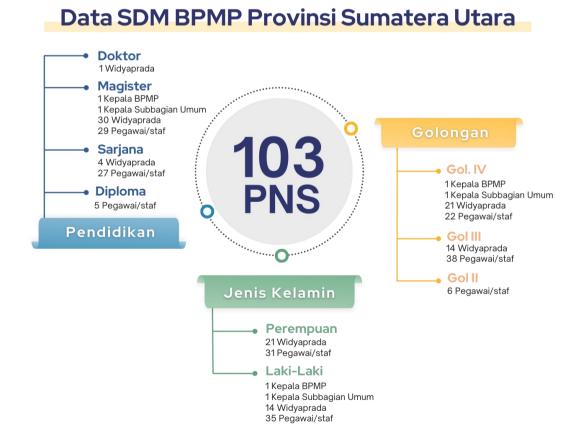
#### Linimasa Perubahan Nomenklatur





Sumber Daya Manusia (SDM) BPMP Provinsi Sumatera Utara pada Bulan Desember tahun 2024 sebanyak 172 orang, dengan jabatan struktural, jabatan fungsional Widyaprada, jabatan fungsional umum dan PPNPN yang terdiri dari 103 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 69 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

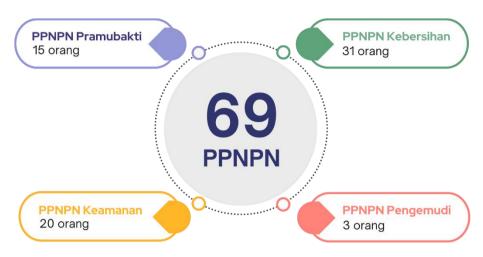
Gambar 1.2 Data SDM BPMP Provinsi Sumatera Utara



Sumber data: Kepegawaian BPMP Provinsi Sumatera Utara Per 31 Desember 2024

Gambar 1.3 Data PPNPN BPMP Provinsi Sumatera Utara

#### Data PPNPN BPMP Provinsi Sumatera Utara



Sumber data: Kepegawaian BPMP Provinsi Sumatera Utara Per 31 Desember 2024

Gambar 1.4 Beban Kerja BPMP Provinsi Sumatera Utara

## Beban Kerja BPMP Provinsi Sumatera Utara

23.533	8.363	PAUD	
Satuan Pendidikan	442	РКВМ	
Satuan Pendidikan	9.849	SD	
212.804	2.741	SMP	
Guru	1.086	SMA	
	968	SMK	
3.119.464	22	SKB	
Siswa	62	SLB	

33 Kabupaten/Kota 14 Cabang Dinas 1 Provinsi

Sumber data: DAPODIK Per 31 Desember 2024



#### B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 11 tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;

#### C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi

## **Tugas BPMP**

"Melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, Pendidikan menengah dan Pendidikan Masyarakat di provinsi."

## **Fungsi BPMP**

- Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- Pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- Pelaksanaan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu Pendidikan;
- Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan Masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
- Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan Pendidikan masyarakat;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat; dan
- Pelaksanaan urusan administrasi

Gambar 1.5 Struktur Organisasi BPMP Provinsi Sumatera Utara

#### Struktur Organisasi BPMP Provinsi Sumatera Utara



Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BBPMP dan BPMP, dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara dibantu oleh Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional.

**Subbagian Umum** mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, kerumahtanggaan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

**Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## D. Isu-Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian antara lain:

- 1. Satuan Pendidikan Program Sekolah Penggerak menjadi penggerak transformasi satuan pendidikan di daerahnya;
- 2. Persepsi positif terhadap Implementasi Kurikulum Merdeka;
- 3. Pembentukan dan pemberdayaan komunitas belajar sebagai upaya peningkatan kompetensi guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka;

- 4. Percepatan transformasi digital pada satuan pendidikan;
- 5. Optimalisasi pemanfaatan Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data pada satuan pendidikan;
- 6. Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan berbasis data melalui indikator prioritas SPM Pendidikan;
- 7. Pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah atau Pengawas Sekolah;
- 8. Penerimaan Peserta Didik Baru yang objektif, akuntabel dan transparan;
- 9. Peningkatan kualitas pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) dan Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar);
- 10. Penjaringan mitra pembangunan dalam upaya peningkatan skor capaian literasi dan numerasi satuan pendidikan;
- 11. Pemerintah Daerah mempunyai Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang aktif;
- 12. Pemerintah Daerah memiliki peningkatan indeks kualitas Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

#### **BABII**

## Perencanaan Kinerja

#### A. Rencana Strategis

Sesuai Renstra Periode Tahun 2020-2024 revisi 22 Januari 2024, BPMP Provinsi Sumatera Utara menetapkan sebagai berikut:

## Visi

Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebhinekaan global.

## Misi

- Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- Melakukan pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- Melaksanakan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu Pendidikan;
- Melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan Masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;

Melakukan pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan Pendidikan masyarakat;

Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat; dan

Melaksanakan urusan administrasi

#### **B. Tujuan Strategis**

BPMP Provinsi Sumatera Utara menetapkan dua tujuan strategis yang akan dicapai untuk periode perencanaan 2020-2024.

Tujuan Strategis BPMP Provinsi Sumatera Utara Periode Perencanaan 2020-2024

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Tujuan	Target 2024
Tujuan Strategis 1: Peningkatan mutu pendidikan jenjang	<ol> <li>Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya.</li> </ol>	3,92%
PAUD, Dikdas dan Dikmen di provinsi Sumatera Utara	Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	35%
Tujuan Strategis 2: Peningkatan tata kelola BPMP	<ol> <li>Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.</li> </ol>	А
Provinsi Sumatera Utara	2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	85

## Sasaran Kegiatan BPMP Provinsi Sumatera Utara Periode Perencanaan 2022-2024 Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan BPMP Provinsi Sumatera Utara

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Kinerja	
	Tujuan	2020- 2021	2022	2023	2024
Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen	<ol> <li>Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya.</li> </ol>	-	0,98	1,98	3,92
	2. Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	-	25	30	35
Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Sumatera Utara	<ol> <li>Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.</li> </ol>	BB	А	Α	A
	2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA- K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	82	83	84	85

#### C. Program Prioritas 2024

BPMP Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung program prioritas Kementerian melalui program Merdeka Belajar turut serta melaksanakan program sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan Pembinaan Kurikulum Merdeka
- 2. Pelaksanaan Pembinaan Asesmen Nasional
- 3. Pelaksanaan Pembinaan Transfer Daerah
- 4. Pelaksanaan Pembinaan Sekolah Penggerak
- 5. Pelaksanaan Pembinaan Perencanaan Berbasis Data
- 6. Pelaksanaan Pembinaan Kemitraan
- 7. Pelaksanaan Pembinaan Digitalisasi Sekolah

#### D. Rencana Kerja dan Anggaran

Sebagai pengguna anggaran BPMP Provinsi Sumatera Utara, menyusun rencana kerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Berikut tren alokasi anggaran 2020-2024 BPMP Provinsi Sumatera Utara:

Realisasi % Realisasi Pagu Rp 42,654,126,000 2020 Rp 39.316.434.221 Rp 29,510,748,000 2021 Rp 29,290,337,343 Rp 34,764,132,000 98,12% 2022 Rp 34,111,303,880 Rp 48,375,152,000 2023 Rp 48,253,043,259 Rp 55,564,053,000 2024 96.54% Rp 53,638,818,898

Grafik 2.1 Tren Alokasi Anggaran Tahun 2020-2024

Adapun rencana kerja dan anggaran tahun 2024 terdapat pada RKA-KL BPMP Provinsi Sumatera Utara, dengan alokasi pagu sebagai berikut:

NoNama KegiatanAnggaran1Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas<br/>Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan<br/>Pendidikan Menengah30,150,088,0002Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang<br/>PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas25,413,965,000

Tabel 2.2 Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2024

### E. Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Permendikbudristek/Kepmendikbudristek IKU, BPMP Provinsi Sumatera Utara menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun sebagai berikut:

Tabel 2.3 Matriks perjanjian kinerja dan renstra satker 2020-2024

NI-	Sasaran			1	Γarget I	Renstra		Т	arget F	PK
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Meningkatnya	1.1 Persentase satuan pendidikan (PAUD, Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	%	-	0,98	1,98	3,92	0,98	1,98	3,92
1	mutu pendidikan jenjang PAUD,	1.2 Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	%	-	25	30	35	25	30	52,95
	Menguatnya tata kelola dan sistem	2.1 Predikat SAKIP BPMP Sumatera Utara	Predikat	BB	Α	А	А	А	Α	А
2	pengendalian manajemen BPMP Provinsi Sumatera Utara	2.2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL	Nilai	82	83	84	85	83	84	94,5

Dalam rangka mencapai tujuan strategis, BPMP Provinsi Sumatera Utara menetapkan target tahunan yang akan dicapai, yaitu melalui perjanjian kinerja tahun 2024. Penetapan target perjanjian kinerja telah mempertimbangkan hasil evaluasi capaian tahun-tahun sebelumnya, target rencana strategis, serta ketersediaan alokasi anggaran, yang dilakukan melalui reviu rencana strategis. Terdapat perbedaan antara target PK 2024 dan target renstra 2024, yaitu antara lain pada:

1. IKK 1.2 Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen), target restra bernilai 35 sementara target PK senilai 52,95. perbedaan ini disebabkan kerena capaian kinerja IKK 1.2 pada tahun 2023 mencapai nilai yang lebih besar dari target renstra 2024 yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga pada awal tahun 2024 kami menetapkan target PK untuk IKK 1.2 berpedoman pada capaian nilai kinerja IKK 1.2 pada tahun 2023;

2. IKK 2.2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL target restra bernilai 85 sementara target PK senilai 94,5. perbedaan ini disebabkan kerena capaian kinerja IKK 2.2 pada tahun 2023 mencapai nilai yang lebih besar dari target renstra 2024 yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga pada awal tahun 2024 kami menetapkan target PK untuk IKK 2.2 berpedoman pada capaian nilai kinerja IKK 2.2 pada tahun 2023.

Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Utara tahun 2024.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Awal)

Sasaran (S/SK)	Indikator (IKU/IKK)	Target Perjanjian Kinerja 2024
[1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[1.1] Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	3.92
[1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[1.2] Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	52.95
[2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	[2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	А
[2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	[2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	94.50

Tabel 2.5 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 (Awal)

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 27.961.216.000,-
2	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 26.250.677.000,-
		Total Anggaran	Rp. 54.211.893.000,-

Berikut ringkasan revisi Perjanjian Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Utara tahun 2024.

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Revisi)

Sasaran (S/SK)	Indikator (IKU/IKK)	Target Perjanjian Kinerja 2024
[1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[1.1] Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	3.92
[1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[1.2] Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	52.95
[2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	[2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	А
[2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	[2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	94.50

Tabel 2.7 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 (Revisi)

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp 30.150.088.000-
2	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp 25.413.965.000
		Total Anggaran	Rp 55.564.053.000

Pada tahun 2024, BPMP Provinsi Sumatera Utara melakukan Revisi Perjanjian Kinerja pada akhir tahun 2024, penyesuaian yang dilakukan dalam revisi tersebut antara lain dikarenakan adanya:

- Pergantian Pimpinan BPMP Provinsi Sumatera Utara pada bulan Meret tahun 2024
- 2. Adanya penambahan anggaran belanja modal akibat pembukaan dana blokir Penyesuaian alokasi anggaran pada Perjanjian Kinerja dari anggaran sebesar Rp. 54.211.893.000,- menjadi Rp. Rp 55.564.053.000



## **BABIII**

## Akuntabilitas Kinerja

## A. Capaian Kinerja

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2024, BPMP Provinsi Sumatera Utara menetapkan 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja. Berikut informasi tingkat ketercapaiannya selama tahun 2024.

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
	[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	%	3,92	7,40	189%
1		[IKK 1.2] Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	%	52,95	100	189%
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	Predikat	А	Α	-
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAK/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	Nilai	94,50	98,28	104%

#### A.1. Sasaran Kegiatan 1

Terdapat perbedaan sasaran kegiatan 1 [SK 1] pada tahun 2020-2021 dengan 2022-2024, pada tahun 2020-2021 sasaran kegiatan 1 [SK 1] yaitu Meningkatnya penjaminan mutu Pendidikan di seluruh jenjang pendidikan dengan pengukuran capain kinerja menggunakan rapor mutu yang bersumber dari aplikasi PMP, sedangkan pada tahun 2022-2024 sasaran kegiatan 1 [SK 1] yaitu Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen dengan pengukuran capaian kinerja menggunakan rapor pendidikan yang bersumber dari hasil Asesmen Nasional (AN) dan Survei Lingkungan Belajar. sehingga capaian kinerja tahun 2020-2021 dengan 2022-2024 tidak dapat dibandingkan.

# Tahun 2020 dan 2021 [SK 1] Meningkatnya penjaminan mutu Pendidikan di seluruh jenjang Pendidikan.

Pada tahun 2020-2021 [SK 1] Meningkatnya penjaminan mutu Pendidikan di seluruh jenjang pendidikan terbagi menjadi 3 Indikator Kinerja. Berdasarkan hasil rapor mutu tahun 2020 dan 2021 (sumber aplikasi PMP) diperoleh data sebagai berikut:

a. [IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja satuan pendidikan (*scorecard*) minimal 75.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja IKK 1.1 2020-2021

Indikator Kegiatan Kinerja		2020			2021	
[IKK 1.1] Persentase	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja satuan pendidikan (scorecard) minimal 75	26,5	24,3	92	27,4	38,06	138,81

Dari data capaian diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi IKK 1.1 pada tahun 2020 tidak mencapai target, namun pada tahun 2021 mengalami kenaikan dengan capaian 138,81%.

b. [IKK 1.2] Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara satuan pendidikan dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk.

Tabel 3.3 Capaian Kinerja IKK 1.2 Tahun 2020-2021

Indikator Kegiatan Kinerja		2020			2021	
[IKK 1.2] Persentase	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara satuan pendidikan dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	5	3,4	68	5	4,4	88

Dari data capaian diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi IKK 1.2 pada tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami penurunan dan tidak mencapai target yang ditetapkan.

c. [IKK 1.3] Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan.

Tabel 3.4 Capaian Kinerja IKK 1.2 Tahun 2020-2021

Indikator Kegiatan Kinerja		2020			2021	
[IKK 1.3]	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase			Capaian			Capaian
Kabupaten/Kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	95	97,49	103	95,2	100	105

Dari data capaian diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi IKK 1.3 pada tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami kenaikan dan melebihi target yang ditetapkan.

# Tahun 2022-2024 [SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen

Pada tahun 2022 dan 2023 Ketercapaian Sasaran Kegiatan terkait meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen belum dapat dilakukan perhitungan berdasarkan rapor pendidikan. Hal ini disebabkan belum tersedianya data hasil Asesmen Nasional (AN) dan Survei Lingkungan Belajar sehingga pengukuran capaian kinerja dilakukan Berdasarkan data akreditasi (sumber data dari BAN PAUD dan PSKP BSKAP). Pengukuran ketercapaian sasaran kegiatan 1 [SK menggunakan rapor pendidikan baru dapat dilakukan pada tahun 2024. Target dan Ketercapaian Sasaran Kegiatan terkait meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen pada tahun 2022-2024 terbagi menjadi 2 indikator kinerja, data ketercapaian dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

a. [IKK 1.1] persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya pada tahun 2022 mencapai 2,12% dari target sebesar 0,98%, pada tahun 2023 mencapai 1.36% dari target sebesar 1.98%, sedangkan pada tahun 2024 mencapai 7.40% dari target sebesar 3.92%.

Tabel 3.5 Capaian Kinerja IKK 1.1 Tahun 2022-2024

Indikator Kegiatan Kinerja		2022			2023			2024	
[IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
(PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	0.98	2.12	216	1.98	1.36	69	3.92	7.4	189

Dari data ketercapaian realisasi IKK 1.1 tahun 2022-2024 dapat dilihat kenaikan dan penurunan ketercapian IKK 1.1, pada tahun 2023 capaian kinerja mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2022 mencapai 216% dan tahun 2024 capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan sebesar 189% dari target.

b. [IKK 1.2] Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen).

Tabel 3.6 Capaian Kinerja IKK 1.2 Tahun 2022-2024

Indikator Kegiatan Kinerja		2022			2023			2024	
[IKK 1.2] Persentase	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	25	97.1	388	30	52.94	176	52.95	100	189

Dari data ketercapaian realisasi IKK 1.2, tahun 2022-2024 terjadi tren kenaikan pada setiap tahun dan ketercapaian indikator kinerja jauh melampaui target terutama pada tahun 2024 yang capaian kinerja mencapai 189% dari target.

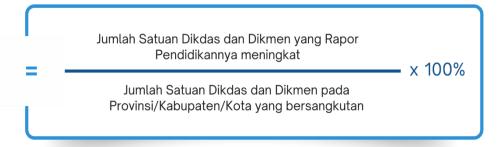


## A.1.1 Definisi Operasional dan Metode Perhitungan Capaian Kinerja

#### Indikator Kinerja Kegiatan 1.1

Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya

- Definisi operasional Indikator Kinerja
   Persentase dari satuan PAUD dan Dikmas di wilayah masing-masing yang memiliki mutu pembelajaran lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya berdasarkan hasil rapor pendidikan atau survei lingkungan belajar.
- 2. Metode Perhitungan Indikator Kinerja



Tabel 3.7 Capaian Kinerja Berdasarkan IKK 1.1

Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024								
Realisasi	Realisasi	Target Akhir Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi Nasional	Capaian Kinerja BPMP dibanding Nasional				
2,12	1,36	3,92	3,92	7,40	189%	-	-				

<sup>\*</sup> Data realisasi tahun 2022 menggunakan sumber data BAN PAUD dan PSKP BSKAP

Pengukuran IKK 1.1 pada tahun 2024 menggunakan rapor pendidikan tahun 2024 (Sumber data dari hasil Asesmen Nasional dan hasil Survei Lingkungan Belajar tahun 2023). Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan tim Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, realisasi sebesar 7,40 sementara target yang ditetapkan adalah sebesar 3,92. dengan demikian capaian kinerja BPMP Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024 yaitu sebesar 189%.

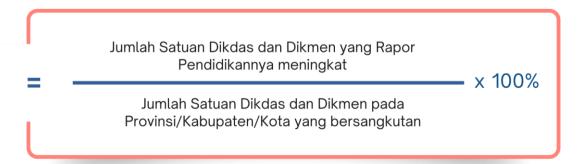
#### Indikator Kegiatan 1.2

Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)

#### 1. Definisi Operasional

Persentase dari provinsi/kabupaten/kota di wilayah masing-masing yang memiliki rapor pendidikan lebih tinggi dibandingkan rapor pendidikan tahun sebelumnya

#### 2. Metode Perhitungan



Tabel 3.8 Capaian Kinerja Berdasarkan IKK 1.2

Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024								
Realisasi	Realisasi	Target Akhir Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi Nasional	Capaian Kinerja BPMP dibanding Nasional				
97,1	52,94	35	52,95	100	189%	-	-				

<sup>\*</sup> Data realisasi tahun 2022 menggunakan sumber data BAN SM

Pengukuran IKK 1.2 menggunakan data rapor pendidikan 2023 dibandingkan dengan rapor pendidikan 2022. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh tim Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, 34 kabupaten/kota/provinsi ada sebanyak dari sejumlah 34 kabupaten/kota/provinsi yang meningkat nilai Rapor Pendidikannya di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Dengan demikian 100% kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang meningkat Rapor Pendidikannya.



## A.1.2 Tren Capaian Kinerja dari tahun 2020-2024

Pada awal Bab III telah dijelaskan bahwa Sasaran Kinerja (SK 1) pada tahun 2020-2021 pengukuran capaian kinerja menggunakan rapor mutu yang bersumber dari aplikasi PMP, sedangkan pada tahun 2022-2024 pengukuran capaian kinerja menggunakan rapor pendidikan yang bersumber dari hasil Asesmen Nasional (AN) dan Survei Lingkungan Belajar. sehingga capaian kinerja SK 1 tahun 2020-2021 dengan 2022-2024 tidak dapat dibandingkan dan penjelasan Tren capaian kinerja ditampilkan menjadi 2 bagian yaitu:

Grafik 3.1 Tren capaian kinerja tahun 2020-2021 (IKK 1.1)



[IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (*scorecard*) minimal 75 pada tahun 2020 dan 2021 Capaian kinerjanya masing-masing sebesar 24.3 dan 38,06 Dari target masing-masing sebesar 26.5 dan 27,4

dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 dari tahun 2020 sampai tahun 2021 mengalami kenaikan, tetapi pada tahun 2020 capaian kinerja tidak mencapai target.

Grafik 3.2 Tren capaian kinerja tahun 2020-2021 (IKK 1.2)



[IKK 1.2] Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk pada tahun 2020 dan 2021 capaian kinerjanya masing-masing sebesar 3.4 dan 4.4 Dari target masing-masing pada tahun 2020 sebesar 5 dan tahun 2021 sebesar 5.

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk dari tahun 2020 sampai tahun 2021 mengalami penurunan dan tidak mencapai target yang ditetapkan.



Grafik 3.3 Tren capaian kinerja tahun 2020-2021 (IKK 1.3)

[IKK 1.3] Persentase kabupaten/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan pada tahun 2020 dan 2021 capaian kinerjanya masing-masing sebesar 97,49 dan 100 Dari target masing-masing pada tahun 2020 sebesar 95 dan tahun 2021 sebesar 95.2

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Persentase kabupaten/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan dari tahun 2020 sampai tahun 2021 mengalami kenaikan dan melebihi target yang ditetapkan.





[IKK 1.1] persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya pada tahun 2022 mencapai 2,12% dari target sebesar 0,98%, pada tahun 2023 mencapai 1.36% dari target sebesar 1.98%, sedangkan pada tahun 2024 mencapai 7.40% dari target sebesar 3.92%.

Dari data ketercapaian indikator kinerja IKK 1.1 tahun 2022-2024 dapat dilihat kenaikan dan penurunan ketercapian IKK 1.1, pada 2022 capaian kinerja melebihi target tetapi pada tahun 2023 capaian kinerja mengalami penurunan dan tidak mencapai target yang ditetapkan, sedangkan pada tahun 2024 capaian kinerja mengalami kenikan kembali dan melampaui target yang ditetapkan sebesar 189% dari target.

Grafik 3.5 Tren capaian kinerja tahun 2022-2024 (IKK 1.2)



[IKK 1.2] Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) pada tahun 2022 mencapai 97,1% dari target sebesar 25%, pada tahun 2023 mencapai 52,94% dari target sebesar 30%, sedangkan pada tahun 2024 mencapai 100% dari target 52,95%.

Dari data ketercapaian indikator kinerja IKK 1.2 tahun 2022-2024 dapat dilihat terjadi Tren kenaikan ditiap tahun dan ketercapaian indikator kinerja jauh melampau target terutama pada tahun 2024 yang capaian kinerja mencapai 100 persen atau mencapai 189% dari target.

## A.1.3 Analisis Program dan Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024 dalam upaya mendukung pencapaian target IKK. 1.1 dan IKK 1.2, serta faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan program, hambatan atau permasalahan yang dihadapi langkang-langkah antisipati yang telah ditempuh dalam mangatasi hambatan tersebut serta strategi yang ditempuh untuk mencapai target kinerja tahun 2024, dibawah ini akan dijelaskan secara rinci yaitu:

#### a. Pelaksanaan Pembinaan Kurikulum Merdeka

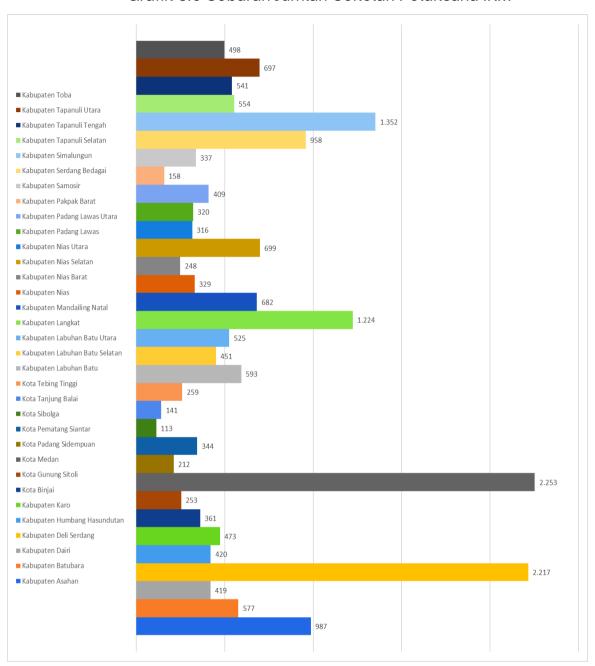
Dalam rangka pemulihan pembelajaran tahun 2022 - 2024, Kemendikbudristek pada tahun 2024 mengeluarkan kebijakan bahwa sekolah wajib untuk menggunakan Kurikulum Merdeka sebagai dasar pengelolaan pembelajaran, karena pemerintah menganggap sudah cukup masa peralihan dari kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka pada tahun-tahun sebelumnya.

Tahun 2024 menjadi penentuan kebijakan kurikulum nasional berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran. Evaluasi ini menjadi acuan Kemendikburistek dalam mengambil kebijakan lanjutan pasca pemulihan pembelajaran.

Sekolah diberi kebebasan mengimplementasikan kurikulum merdeka sesuai kemampuan dan kondisi sekolahnya. Saat ini ada 19.920 satuan pendidikan yang mendaftarkan diri menjadi pelaksana kurikulum merdeka di Sumatera Utara. Berikut data jumlah sekolah menurut kabupaten/kota sesuai pilihannya masingmasing.

Hingga akhir tahun 2024, ada 19.920 satuan pendidikan atau 84% dari total sekolah di Sumatera Utara mendaftarkan diri menjadi pelaksana IKM.

Grafik 3.6 Sebaran Jumlah Sekolah Pelaksana IKM



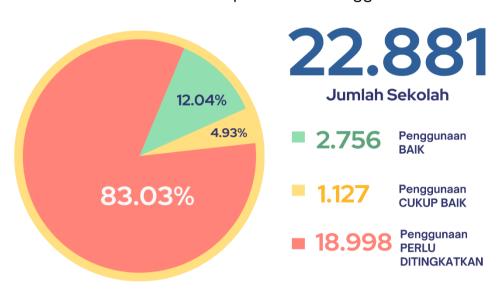
Sumber data: Dashboard Kurikum Merdeka kemedikbudristek) per 31 Desember 2024

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka yaitu antara lain:

- Kegiatan Refleksi Implementasi Kurikulum Merdeka yaitu Melakukan refleksi terkait pelaksanaan IKM dengan Dinas Pendidikan, dan Satuan Pendidikan sebagai masukan untuk perbaikan pelaksanaan program pendampingan IKM, tantangan utama dalam kegiatan ini yaitu Pemahaman konsep yang salah tentang Kurikulum Merdeka dan keberlanjutan implementasi Kurikulum Merdeka
- Visitasi dan Pendampingan IKM bagi Sekolah Pelaksana Kurikulum Merdeka Yang Materinya didasarkan pada hasil Refleksi Pelaksanaan IKM Tahun 2023/2024 yaitu Melakukan pemantauan dan pendampingan pelaksanaan IKM secara langsung ke lapangan yaitu Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan untuk mendapatkan informasi pelaksanaan IKM di lapangan. tantangan utama kegiatan ini adalah: Terjadinya miskonsepsi pada implementasi IKM terutama pada projek penguatan profil pelajar pancasila dan Sekolah belum memberdayakan komunitas belajar internal untuk peningkatan kompetensi guru dalam implementasi kurikulum merdeka
- Festival Kurikulum Merdeka yaitu Melakukan festival kurikulum merdeka dengan sasaran Satuan Pendidikan dan Orang tua dalam pelaksanaannya yang akan dilakukan secara luring dan sebagian lainnya dilakukan secara daring. Pameran ini terbuka untuk umum sehingga masyarakat umum dapat hadir memeriahkan festival kurikulum merdeka. tantangan utama dalam kegiatan ini adalah Konsep FKM, Kesediaan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi dan Mitra Kerja untuk menjadi peserta dan mengisi stand yang telah disediakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan panitia.

#### **Adoption Rate PMM**

Platform Merdeka Mengajar merupakan sarana digital yang disediakan Kemendikbudristek RI untuk membantu guru dalam meningkatkan kualitas kompetensi dan pembelajaran. Tenaga Pendidik pada satuan pendidikan yang sudah login pada PMM belum tentu sudah mulai belajar hingga tahap berikutnya dalam menyelesaikan post-test, menyelesaikan topik bahkan mengunggah aksi nyata, yang digambarkan dalam gambar berikut:



Gambar 3.1 Statistik Tipe sekolah Pengguna PMM

Sumber data: Dashboard IKM kemendikbudristek

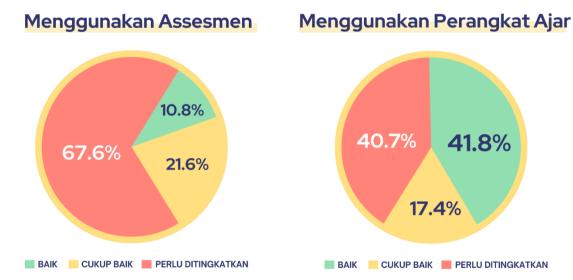
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa 22.881 jumlah sekolah baru 2.756 atau 12,04% yang menggunakan PMM masuk dalam kategori pengguna BAIK, 1.127 sekolah atau 4, 93% masuk kategori pengguna CIKUP BAIK dan sisanya sebanyak 18.998 sekolah atau sebesar 83,03% masuk dalam kategori PERLU DITINGKATKAN.

Berdasarkan data per 11 Desember 2024 meskipun sudah 29 daerah yang masuk kategori hijau dalam pengaktifan akun belajar atau sebesar 84, 23% sekolah IKM sudah melakukan login PMM, dari angka tersebut masih 57% yang mulai belajar, dan baru 35,8%

yang menyelesaikan topik pembelajaran dalam PMM. bisa dilihat perbandingannya dalam gambar berikut:

Gambar 3.2 Statistik Status Penggunaan PMM





Sumber data: Dashboard IKM kemendikbudristek

Dari gambar diatas diperoleh data sebagai berukut:

- Sekolah IKM pengguna PMM yang termasuk dalam tahap mulai belajar dengan kategori baik sebesar 57%, cukup baik 9,6% dan perlu ditingkatkan 33,3%;
- 2. Sekolah IKM pengguna PMM yang termasuk dalam tahap proses belajar dengan kategori baik tidak ada, cukup baik 50,3% dan perlu

- ditingkatkan 49,7%
- 3. Sekolah IKM pengguna PMM yang termasuk dalam tahap aksi nyata dengan kategori baik sebesar 14,2%, cukup baik 8,5% dan perlu ditingkatkan 77,3%
- 4. Sekolah IKM pengguna PMM yang termasuk dalam tahap menggunakan asesmen dengan kategori baik sebesar 8,7%, cukup baik 21,7% dan perlu ditingkatkan 69,6%
- 5. Sekolah IKM pengguna PMM yang termasuk dalam tahap menggunakan perangkat ajar dengan kategori baik sebesar 35,8%, cukup baik 20,9% dan perlu ditingkatkan 43,3%

#### b. Pelaksanaan Pembinaan Asesmen Nasional

Amanat dari Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa evaluasi dalam bidang pendidikan dilakukan oleh pemerintah, pendidik dan satuan pendidikan, merupakan bagian penting dalam pengukuran nasional mutu pendidikan secara yang dilakukan berkesinambungan dan berkelanjutan. Salah satu bentuk dari evaluasi tersebut adalah melakukan Asesmen Nasional (AN) sebagaimana tertuang lebih lanjut penjabarannya dalam Permendikbudristek RI Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional yang kemudian dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Kepala Badan Standar, Kutrikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), nomor: 019/H/KP/2024, tentang Pedoman Penyelenggaraan AN dan nomor: 020/H/KP/2024 tentang Pedoman Penyelenggaran Sulingjar PAUD.

Sebagai program evaluasi, AN bertujuan untuk mengukur mutu pendidikan secara lebih komprehensif dan berfokus pada peningkatan kualitas proses pembelajaran. AN diperkenalkan dengan pendekatan yang lebih fokus pada evaluasi sistem dan mutu pendidikan secara keseluruhan. AN dirancang untuk memberikan gambaran yang lebih holistik tentang kualitas pembelajaran di sekolah, meliputi aspek

kognitif (literasi dan numerasi) dan non-kognitif (karakter dan iklim belajar). AN difokuskan pada kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh siswa untuk belajar sepanjang hayat, seperti kemampuan literasi dan numerasi, yang dinilai lebih relevan untuk mendukung perkembangan siswa dalam jangka panjang. Dengan demikian, asesmen ini diharapkan dapat membantu sekolah dan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara berkesinambungan. AN memfokuskan diri pada penggunaan data untuk menganalisis dan meningkatkan mutu pendidikan. Data yang diperoleh dari AN diharapkan bisa digunakan oleh pemerintah dan sekolah untuk merancang intervensi yang lebih tepat sasaran dalam meningkatkan hasil belajar dan mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan. Diharapkan hasil AN mendorong perubahan positif dalam sistem pendidikan Indonesia dengan menyediakan informasi yang relevan dan berguna untuk semua pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, sekolah, dan pembuat kebijakan.

Di dalam Salinan Pedoman Penyelenggaraan AN yang dikeluarkan oleh BSKAP, disebutkan bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab BPMP sebagai UPT Kemendikbudristek adalah melakukan pemantauan persiapan AN dan sulingjar di kabupaten/kota agar berjalan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan AN dan sulingjar tahun 2024. Sehubungan dengan tugas dan fungsi BPMP Provinsi Sumatera Utara seperti tersebut di atas, BPMP melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan AN tahun 2023 sebagai upaya dalam rangka persiapan dan mitigasi resiko terhadap pelaksanaan AN tahun 2024. Oleh karena itu BPMP Provinsi Sumatera Utara melakukan kegiatan Monitoring Persiapan dan Advokasi Pelaksanaan AN Tahun 2024. Dalam kegiatan ini BPMP berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Asesmen Nasional dan pengisian survei lingkungan belajar diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3.9 Sebaran satuan pendidikan pelaksana AN dan Sulingjar

No	Jenjang	Mengikuti AN dan Sulinjar	Tidak Mengikuti AN	Mengikuti AN Tidak Memadai	Tidak Mengikuti Sulingjar	Mengikuti Sulingjar Tidak Memadai
1	PAUD	7.749	-	-	614	441
2	SD	9.802	47	49	-	-
3	SLB	59	3	4	-	_
4	PKBM	357	85	13	-	-
5	SMP	2.710	31	17	-	_
6	SMA	1.083	3	5	-	-
7	SMK	960	8	5	-	_
Total		22.720	187	93	614	441

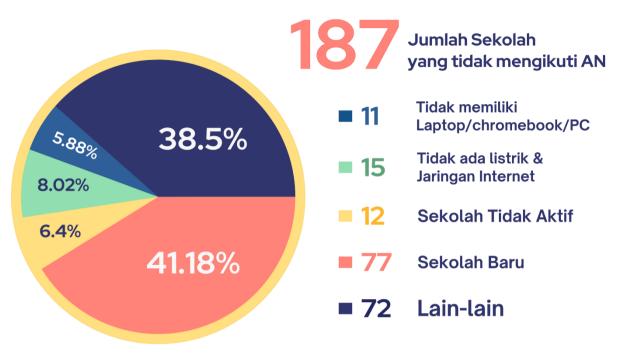
Sumber Data: Dashboard AN Kemendikbudristek per tanggal 31 Desember 2024

Satuan pendidikan di provinsi sumatera utara yang mengikuti Asesmen Nasional dan Survei Lingkungan belajar yaitu berjumlah 22.720 satuan pendidikan, yang tidak mengikuti Asesmen Nasional sebanyak 187 satuan pendidikan, 93 satuan pendidikan mengikuti asesmen nasional namun belum memadai, 614 satuan pendidikan yang tidak mengikuti survei lingkungan belajar dan 441 satuan pendidikan mengikuti survei lingkungan belajar namun belum memadai.

Banyak faktor yang menyebabkan satuan pendidikan tidak mengikuti asesmen nasional dan survei lingkungan belajar, antara lain:

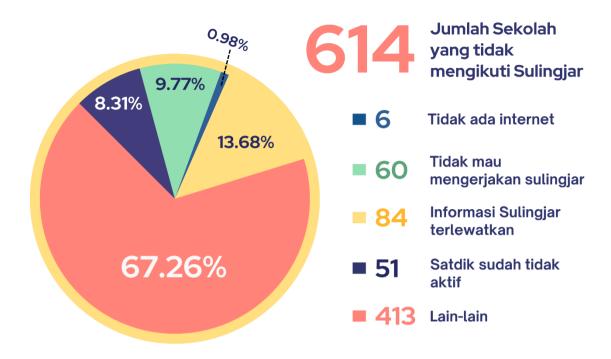
- Tidak mengikuti Asesmen Nasional karena merupakan sekolah baru
- Sekolah sudah tidak aktif lagi
- tidak ada listrik dan jaringan
- Tidak memiliki laptop/Chromebook/PC
- Tidak mau mengerjakan survei lingkungan belajar
- informasi pengisian survei lingkungan belajar terlewatkan

Grafik 3.7 Data Satuan Pendidikan yang tidak mengikuti AN



Dari grafik diatas dapat dilihat dari 187 satuan pendidikan yang Tidak mengikuti Asesmen Nasional, faktor penyebab penyebabnya adalah merupakan sekolah baru sebesar 41,18% atau berjumlah 77 sekolah atau Sekolah sudah tidak aktif lagi sebesar 6,42% atau berjumlah 12 sekolah, tidak ada listrik dan jaringan sebesar 8,02% atau berjumlah 15 sekolah, Tidak memiliki laptop/Chromebook/PC sebesar 5,88% atau berjumlah 11 sekolah dan karena faktor penyebab lainnya sebesar 38,50% atau berjumlah 72 sekolah.

Grafik 3.8 Data Satuan pendidikan tidak mengikuti Survei Lingkungan Belajar



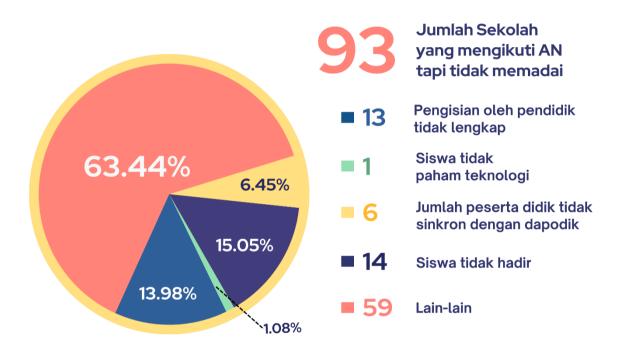
Dari grafik diatas dapat dilihat dari 614 satuan pendidikan yang Tidak melaksanakan pengisian Survei Lingkungan Belajar, faktor penyebab penyebabnya adalah Sekolah sudah tidak aktif lagi sebesar 8,31% atau berjumlah 51 sekolah, tidak mau mengerjakan survei lingkungan belajar sebesar 9,77% atau berjumlah 60 sekolah, Tidak ada jaringan internat sebesar 0,98% atau berjumlah 6 sekolah, informasi pengisian survei lingkungan belajar terlewatkan sebesar 13,68% atau berjumlah 84 sekolah dan karena faktor penyebab lainnya sebesar 67,26% atau berjumlah 413 sekolah.

Pada tahun 2024 terdapat satuan pendidikan yang menyelenggarakan asessmen nasional dan pengisian survei lingkungan belajar namun belum memadai, sebayak 93 satuan pendidikan mengikuti asesmen nasional namun belum memadai dan 441 satuan pendidikan mengikuti survei lingkungan belajar namun belum memadai, banyak faktor penyebabnya antara lain:

- Jumlah peserta didik tidak singkron dengan data dapodik
- Siswa tidak hadir
- Siswa tidak mengerjakan/tidak paham teknologi

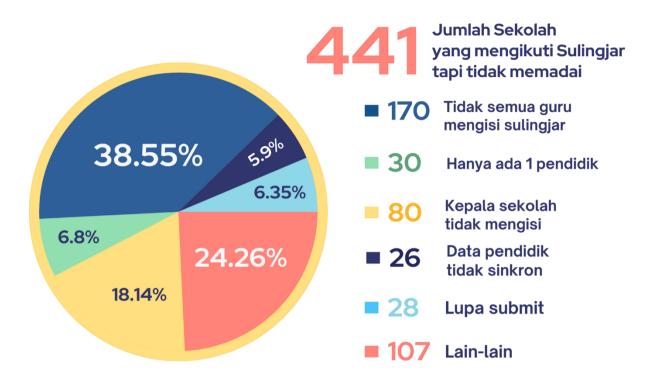
- Pengisian Sulingjar Oleh Pendidik Tidak Lengkap
- tidak mengisi sulingjar karena Hanya ada satu Pendidik
- tidak semua guru mengerjakan atau mengisi sulingjar
- lupa submit atau menyelesaikan
- data pendidik tidak singkron (guru terdata sebagai tendik)
- hanya guru yang mengisi kepala sekolah tidak

Grafik 3.9 Data Satuan Pendidikan Mengikuti AN Tapi Tidak Memadai



Dari grafik diatas dapat dilihat dari 22.720 satuan pendidikan mengikuti Asesmen Nasional dan survei lingkungan belajar ada 93 sekolah yang mengikuti Asesmen Nasional Namun belum memadai, faktor penyebabnya adalah Jumlah peserta didik tidak singkron dengan data dapodik sebesar 6,45% atau berjumlah 6 sekolah, Siswa tidak hadir sebesar 15,05% atau berjumlah 14 sekolah, Siswa tidak mengerjakan/tidak paham teknologi sebesar 1,08% atau berjumlah 1 sekolah, Pengisian Sulingjar Oleh Pendidik Tidak Lengkap sebesar 13,98% atau berjumlah 13 sekolah dan karena faktor penyebab lainnya sebesar 63,44% atau berjumlah 59 sekolah.

Grafik 3.10 Mengikuti Sulingjar Tapi Tidak Memadai



Dari grafik diatas dapat dilihat dari 22.720 satuan pendidikan mengikuti Asesmen Nasional dan survei lingkungan belajar ada 441 sekolah yang mengikuti Survei Lingkungan Belajar Namun belum memadai, faktor penyebabnya adalah Hanya ada satu Pendidik sebesar 6,80% atau berjumlah 30 sekolah, tidak semua guru mengerjakan atau mengisi sulingjar sebesar 38,55,05% atau berjumlah 170 sekolah, lupa submit atau menyelesaikan sebesar 6,35% atau berjumlah 28 sekolah, data pendidik tidak singkron (guru terdata sebagai tendik) sebesar 5,90% atau berjumlah 26 sekolah, hanya guru yang mengisi kepala sekolah tidak sebesar 18,14% atau berjumlah 80 sekolah dan karena faktor penyebab lainnya sebesar 24,26% atau berjumlah 107 sekolah.

#### c. Pelaksanaan Pembinaan Transfer Daerah

Pembinaan Dana Transfer Daerah dilakukan untuk memastikan dana transfer digunakan secara optimal dan tepat sasaran. Pembinaan ini

dilakukan dengan berbagai kegiatan, seperti pelatihan, pendampingan, dan monitoring.

Dana Transfer Daerah merupakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pemerintah daerah. Dana ini digunakan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Beberapa kegiatan pembinaan Dana Transfer Daerah yang dilakukan oleh BPMP Provinsi Sumatera Utara diantaranya:

- Advokasi kebijakan Dana Tranfer Daerah
- Advokasi pemda dengan komitmen rendah dengan BB/BPMP
- Pendampingan penatausahaan Dana Transfer Daerah

### d. Pelaksanaan Pembinaan Sekolah Penggerak

Program Sekolah Penggerak (PSP) adalah upaya untuk mewujudkan visi Pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila. Program Sekolah Penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter, diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru). Program Sekolah Penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Program Sekolah Penggerak akan mengakselerasi sekolah negeri/swasta di seluruh kondisi sekolah untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju. Program dilakukan bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi Program Sekolah Penggerak.

Di Sumatera Utara telah dipilih 749 sekolah PSP dari 3 angkatan yang tersebar di 33 kab/kota. Angkatan-1 sebanyak 164 sekolah (22%), angkatan-2 sebanyak 384 sekolah (51%) dan angkatan-3 sebanyak 201 sekolah (27%). Pada akhir tahun 2022 Angkatan- 3 dalam tahap proses penetapan dan pengurusan administrasi, dan di awal tahun 2023 programnya mulai berjalan, sedangkan pada tahun 2024 tidak dibuka untuk pendaftaran program sekolah penggerak karena program akan berfokus

pada program peningkatan kualitas dan pembinaan serta pengawasan sekolah penggerak.

Sebanyak 6 kabupaten/kota menjadi peserta program PSP-1 yaitu Kota Medan, Karo, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batubara dan Asahan. Daerah ini menjadi pionir implementasi kurikulum merdeka di tingkat sekolah. Desain program PSP ini dikendalikan langsung dari pusat, dimana urusan kendali di daerah menjadi tanggungjawab BPMP, dan kendali di tingkat sekolah dibawah tanggung jawab Balai Besar Guru Penggerak (BBGP). Koordinasi di daerah menjadi kunci bertemuanya semua pihak yang terlibat di sini. Ada 5 intervensi yang dilakukan untuk PSP yaitu:

- 1. Pendampingan konsultatif dan asimetris
- 2. Penguatan SDM sekolah
- 3. Pembelajaran paradigma baru
- 4. Perencanaan berbasis data
- 5. Digitalisasi sekolah

Sekolah Penggerak Sekolah Penggerak Berdasarkan Angkatan Berdasarkan Jenjang 385 333 199 151 164 146 103 15 PAUD Angkatan 1 Angkatan 2 Angkatan 3

Grafik 3.11 Data Sekolah PSP di Sumatera Utara berdasar angkatan dan jenjang

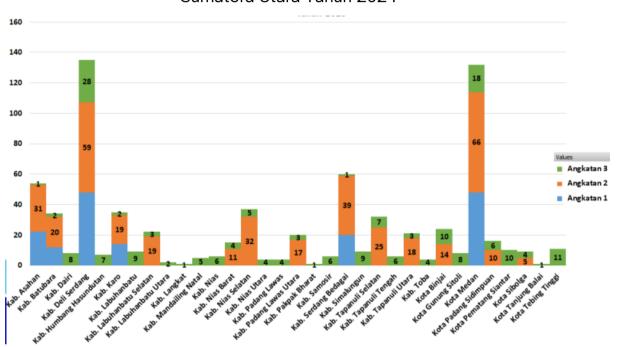
Sumber Data: <a href="https://psp-web.pauddikdasmen.kemdikbud.go.id/per tanggal7">https://psp-web.pauddikdasmen.kemdikbud.go.id/per tanggal7</a> Oktober 2024

Berdasar jenjang, sekolah PSP terbanyak di jenjang SD (333 sekolah, disusul jenjang SMP 151 sekolah, PAUD 146 sekolah, SMA/SMK 103 sekolah dan SLB 15 sekolah sehingga total Sekolah Penggerak di Provinsi Sumatera Utara saat ini berjumlah 748 sekolah dengan sebaran 164

sekolah PSP Angkatan 1, 385 sekolah PSP Angkatan 2 dan 199 sekolah PSP Angkatan 3.

Berdasarkan sebarannya antar daerah, jumlah sekolah PSP terbanyak di Kota Medan 132 sekolah (17,64% dari total SP), disusul Deli Serdang 97 sekolah (12,96% dari total SP) dan Serdang Bedagai 60 unit (8,02% dari total SP).

Grafik 3.12 Sebaran Sekolah Penggerak Tiap Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024



Sumber Data https://psp-web.pauddikdasmen.kemdikbud.go.id/per tanggal 7 Oktober 2024

Jumlah sekolah PSP diseleksi berdasar kemampuannya dalam menjalankan programketika proses seleksi, dan besar kecilnya tidak tergantung jumlah sekolah di daerah.

Grafik 3.13 Perbandingan Jumlah Sekolah PSP dan IKM tiap daerah

Sumber Data <a href="https://psp-web.pauddikdasmen.kemdikbud.go.id/per">https://psp-web.pauddikdasmen.kemdikbud.go.id/per</a> tanggal 7 Oktober 2024

Dari grafik di atas terlihat bahwa jumlah sekolah IKM yang besar tidak kemudian membuat jumlah sekolah PSP menjadi besar. Untuk mendapatkan jumlah sekolah PSP yang besar membutuhkan upaya lebih karena seleksinya cukup ketat, khususnya terkait mindset dan kompetensi kepala sekolahnya. Daerah atau satuan pendidikan perlu menyiapkan diri untuk itu. Sayangnya ini tidak terjadi di beberapa daerah, dimana jumlah sekolah IKM besar (keinginan untuk menerapkan kurikulum merdeka tinggi) tapi karena penyiapan tidak mencukupi (atau malah tidak disiapkan sama sekali) sehingga jumlah sekolah PSP sangat kecil. Ini juga dipengaruhi kuota yang diberikan pusat untuk setiap daerah.

Daerah pada grafik di posisi sebelah kanan menunjukkan ketidaksiapan menyiapkan diri mengikuti seleksi sekolah PSP. Akibatnya mereka tidak atau kurang memiliki model sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka, yang bisa menjadi contoh atau model sekolah lain yang menjadi peserta IKM. Kabupaten tersebut diantaranya adalah: Langkat, Labuhanbatu, Toba, Mandailing Natal. Langkat misalnya dengan jumlah sekolah IKM 807 unit, namun hanya memiliki 2 sekolah PSP (bahkan informasi terakhir tinggal 1), itupun di angkatan-3. Hal ini akan menyebabkan Langkat kesulitan dalam sosialisasi di sekolah IKM karena tidak memiliki model sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka dengan baik. Hal ini juga berlaku untuk 17 kabupaten/kota peserta PSP angkatan-3 di Sumatera Utara.

### Capaian BPMP Sumatera Utara terkait PSP

Perjalanan Program Sekolah Penggerak masuk tahun dan angkatan ketiga. Beberapa capaian BPMP Sumatera Utara yang telah dicatat Pokja-2 sebagai berikut:

- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menandatangani Nota Kesepakatan dengan Mendikbudristek untuk mengimplementasikan PSP di Provinsi Sumatera Utara khususnya Jenjang SMA dan SLB.
- Sebanyak 33 Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari 25 Bupati dan 8 Walikota se Provinsi Sumatera Utara telah menandatangani Nota Kesepakatan dengan Mendikbudristek untuk mengimplementasikan PSP di daerahnya masing- masing khususnya jenjang PAUD, SD dan SMP.
- Sebanyak 34 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi se Provinsi Sumatera Utara telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Program Sekolah Penggerak dengan Mendikbudristek untuk mengimplementasikan PSP di daerahnya masing-masing;
- 4. Sebanyak 748 Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 1, 2 dan 3 telah diangkat sebagai Kepala Sekolah Penggerak Jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan SLB telah terpilih melalui seleksi yang ketat dan Kepala SP Angkatan 1 dan Angkatan 2 telah melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Sekolah Penggerak.
- Sebanyak 748 Sekolah Penggerak Angkatan 1, 2 dan 3 telah ditetapkan sebagai sasaran Sekolah Penggerak Jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan SLB.
- 6. Sebanyak 34 Kepala Dinas Pendidikan Kabupten/Kota/Provinsi telah meng-SK kan Pokja Manajemen Office (PMO) dan telah melaksanakan pertemuan untuk membahas permasalahan dan solusi yang terjadi pada Sekolah Penggerak;
- 7. Sebanyak 748 Sekolah Penggerak Angkatan 1, 2 dan 3 telah diangkat sebagai Kepala Sekolah Penggerak Jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan

- SLB telah mengimplementasikan kutikmpengerak;
- 8. P5 di satuan pendidikan sasaran PSP A1, A2 dan A3 telah terlaksana dan mulai menampakkan hasilnya.
- Sekolah Penggerak di Provinsi Sumatera Utara telah menggunakan PMM dalam peningkatan kemampuan para gurunya dalam membelajarkan siswanya.
- 10. Terjadi perubahan paradigma di kalangan satuan pendidikan untuk bisa menjadi Sekolah Penggerak dan menerapkapkan Kurikulum Merdeka pada Katagori Kurikulum mandiri berbagi.
- 11. Sudah terjalin kerjasama dalam memberhasilkan PSP antar UPT Kemendikbudristek di Provinsi Sumatera Utara

#### e. Pelaksanaan Pembinaan Perencanaan Berbasis Data

Rapor Pendidikan merupakan salah satu program prioritas Kemendikbudristek yang diharapkan dapat mendorong transformasi sistem pendidikan di Indonesia, oleh karena itu rapor pendidikan juga disajikan melalui rangkaian episode merdeka belajar dan rapor pendidikan menjadi program prioritas Kemdikbudristek tahun 2021 s.d 2024 yang tercantum dalam episode ke -19 yaitu tentang rapor pendidikan, dengan tujuan semua peserta didik dapat memperoleh pendidikan yang semakin berkualitas, berkeadilan dan menyenangkan.

Pada tahun 2024 rapor pendidikan telah dirilis pada tanggal 16 Februari 2024, sebagai hasil Asesmen Nasional yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 dan dengan dirilisnya rapor pendidikan tersebut diharapkan semua satuan pendidikan berbenah untuk melakukan Identifikasi, Refleksi, Benahi Perencanaan dan Benahi Pelaksanaan (IRBB). Berdasarkan data rilis rapor pendidikan yang sudah dilakukan Kementerian Pendidikan tersebut,maka tim kerja 04 (Tim Kerja Pendataan dan Penjaminan Mutu Pendidikan),secara responsif membuat suatu aplikasi dashboard tentang rapor pendidikan, dashboard tersebut sebagai informasi terbuka yang bisa diakses oleh siapa saja dan sebagai sumber informasi tentang tingkat capaian seluruh satuan pendidikan PAUD Dikdasmen yang ada di wilayah

provinsi sumatera utara tentang tingkat kualitas capaian login dan unduh rapor pendidikan oleh setiap jenjang satuan pendidikan di wilayah provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan data yang disajikan di Dasbor Rapor Pendidikan Pusat diperoleh informasi dari sejumlah 20.885 sekolah yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara ada sebanyak 7.115 (34,26%), yang sudah unduh sebanyak 5.300 (36,84%), hal ini masing dikategorikan dengan pencapaian yang masih rendah, dimana harapannya keseluruhan sekolah (satuan Pendidikan) yang ada di Sumatera Utara sudah harus login dan unduh 81-100 % sesuai MS Project BPMP Provinsi Sumatera Utara. (data dashboard akses Rapor Pendidikan per 25 Maret 2024).

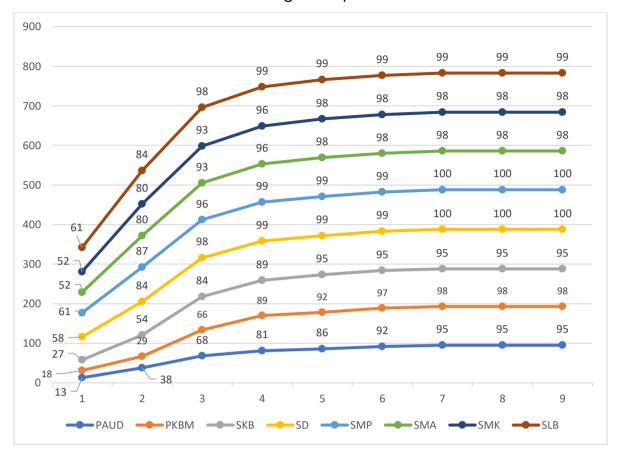
Adapun hasil capaiannya adalah sebagai berikut:

# 1. Satuan Pendidikan Login Rapor Pendidikan

Setelah Rapor Pendidikan diluncurkan (*launching*) oleh kemdikbudristek pada bulan Februari tahun 2024, jumlah satuan pendidikan yang melakukan login untuk melihat hasil rapor satuan dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 3.10 Progres Login Rapor Pendidikan

No.	Jenjang	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Sekolah
1	PAUD	13	38	68	81	86	92	95	95	95	6123
2	PKBM	18	29	66	89	92	97	98	98	98	491
3	SKB	27	54	84	89	95	95	95	95	95	37
4	SD	58	84	98	99	99	99	100	100	100	9578
5	SMP	61	87	96	99	99	99	100	100	100	2624
6	SMA	52	80	93	96	98	98	98	98	98	1048
7	SMK	52	80	93	96	98	98	98	98	98	911
8	SLB	61	84	98	99	99	99	99	99	99	76
Total	Total	44	70	88	94	97	97	98	98	98	20888



Grafik 3.14 Progres Rapor Pendidikan

Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat progress capaian untuk login masingmasing jenjang satuan pendidikan di Provinsi Sumatra Utara sebagai berikut:

# a. Jenjang PAUD

Dari 6.123 satuan PAUD yang mengikuti SULINGJAR pada tahun 2023, pada bulan April jumlah satuan PAUD yang login ke rapor pendidikan ada sebanyak 796 (13%). Secara umum terlihat peningkatan satuan PAUD yang login ke rapor pendidikan setiap bulannya mulai dari bulan April hingga bulan Desember dengan akumulasi peningkatan sebesar 82%. Peningkatan tertinggi dicapai pada bulan Juni 2024 dengan capaian delta sebesar 30% dan mencapai titik stagnan pada 3 (tiga) bulan terakhir yaitu Oktober s.d Desember. Secara keseluruhan capaian login satuan pendidikan ke rapor pendidikan melebihi dari target, dimana target UPT yang ditetapkan yaitu 90% (5.511) satuan PAUD melakukan login ke rapor pendidikan sementara capaian pada akhir Desember 2024 sebesar 95% (5.817) satuan, jadi ada delta capaian sebesar 5% (306) satuan.

### b. Jenjang PKBM

Dari 491 satuan PKBM yang mengikuti Asesmen Nasional si Provinsi Sumatra Utara pada tahun 2023, yang sudah login pada bulan April ada sebanyak 88 satuan (18%). Dari tabel dapat kita lihat peningkatan satuan PKBM yang login ke rapor pendidikan setiap bulannya dengan akumulasi peningkatan sebesar 80%. Peningkatan tertinggi dicapai pada bulan Juni 2024 dengan capaian delta sebesar 37%. Secara keseluruhan capaian login satuan pendidikan PKBM ke rapor pendidikan melebihi dari target UPT, dimana target yang ditetapkan yaitu 80% (393) satuan PKBM melakukan login ke rapor pendidikan sementara capaian pada akhir Desember 2024 sebesar 98% (481) satuan, jadi ada delta capaian sebesar 18% (88) satuan.

# c. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

Jumlah satuan SKB yang melakukan login meningkat setiap bulan sejak April, namun target UPT untuk SKB melakukan login sebesar 100%, dari tabel 1 dapat kita lihat tidak tercapai, dimana pada akhir Desember hasil capaian UPT sebesar 95% jadi ada minus delta sebesar 5%.

# d. Sekolah Luar Biasa (SLB).

Dari 76 satuan yang ada di Provinsi Sumatra Utara, target UPT SLB yang login 100% pada akhir Desember dapat dicapai dengan delta capaian sebesar 39% meningkat dari bulan April ke Desember.

# e. Jenjang Satuan Dasmen (SD, SMP, dan SMA/SMK)

Pada project Charter UPT jenjang pendidikan dasar dan menengah target UPT seluruh satuan (100%) diharapkan login ke rapor pendidikan untuk melihat hasil asesmen nasional yang telah diikuti, dari tabel 1 dapat dilihat bahwa target ini dapat dicapai untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, sementara untuk SMK capaiannya sebesar 99%.

Dari keseluruhan jenjang untuk proses login dapat disimpulkan, capaian delta tertinggi untuk login pada jenjang SMA sebesar 38% pada bulan Mei dan capaian terbaik juga pada jenjang SMA dimana pada bulan juni sudah login 100%.

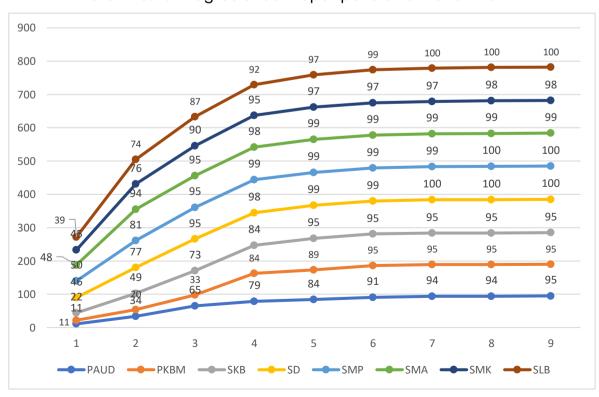
# 2. Satuan Pendidikan melakukan unduh/eksplorasi rapor pendidikan

Tahapan selanjutnya dari proses perencanaan berbasis data yang akan dilakukan oleh satuan pendidikan adalah mempelajari hasil rapor pendidikan dengan mengunduh dan melakukan eksplorasi secara bersama-sama oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Progres satuan pendidikan dalam mengunduh rapor pendidikan dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 3.11 Progres unduh rapor pendidikan tahun 2024

No.	Jenjang	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Sekolah
1	PAUD	13	38	68	81	86	92	95	95	95	6.123
2	PKBM	18	29	66	89	92	97	98	98	98	491
3	SKB	27	54	84	89	95	95	95	95	95	37
4	SD	58	84	98	99	99	99	100	100	100	9.578
5	SMP	61	87	96	99	99	99	100	100	100	2.624
6	SMA	52	80	93	96	98	98	98	98	98	1.048
7	SMK	52	80	93	96	98	98	98	98	98	911
8	SLB	61	84	98	99	99	99	99	99	99	76
Total		44	70	88	94	97	97	98	98	98	20.888

Grafik 3.15 Progres unduh rapor pendidikan tahun 2024



Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat progress capaian unduh masingmasing jenjang satuan pendidikan di Provinsi Sumatra Utara sebagai berikut:

# 1. Jenjang PAUD

Dari 6.123 satuan PAUD yang mengikuti SULINGJAR pada tahun 2023, pada bulan April jumlah satuan PAUD yang sudah login 796 (13%) sementara yang mengunduh rapor pendidikan ada sebanyak 674 (11%) artinya satuan pendidikan yang sudah login tidak semua mengunduh hasil dari rapor pendidikan.

Jika dicermati setiap bulan, terlihat peningkatan satuan PAUD yang mengunduh hasil rapor pendidikan setiap bulan meskipun persentasenya tidak sama dengan satuan yang login, namun pada bulan Desember jumlah satuan yang login dan unduh sama-sama sebesar 95%. Peningkatan tertinggi untuk satuan pendidikan yang mengunduh dicapai pada bulan Juni 2024 dengan capaian delta sebesar 31%. Secara keseluruhan capaian satuan pendidikan yang mengunduh rapor pendidikan melebihi dari target, dimana target UPT yang ditetapkan yaitu 80% (4.898) satuan PAUD mengunduh rapor pendidikan sementara capaian pada akhir Desember 2024 sebesar 95% (5.817) satuan, jadi ada delta capaian sebesar 15% (918) satuan.

#### 2. Jenjang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Dari 491 satuan PKBM yang mengikuti Asesmen Nasional si Provinsi Sumatra Utara pada tahun 2023, yang sudah mengunduh rapor pendidikan pada bulan April ada sebanyak 54 satuan (11%) sementara yang sudah login ada sebanyak 18%, artinya PKBM yang sudah login tetapi tidak mengunduh rapor pendidikannya ada sebanyak 7%.

Dari tabel dapat kita lihat peningkatan satuan PKBM yang login ke rapor pendidikan setiap bulannya dengan akumulasi peningkatan sebesar 84%. Peningkatan tertinggi dicapai pada bulan Juni 2024 dengan capaian delta sebesar 33%. Secara keseluruhan capaian satuan pendidikan PKBM yang mengunduh rapor pendidikan melebihi dari target UPT, dimana target yang ditetapkan yaitu 70% (344) satuan PKBM sementara capaian pada akhir

Desember 2024 sebesar 95% (466) satuan, jadi ada delta peningkatan capaian sebesar 25% (123) satuan. Pada akhir Desember 2024, jumlah satuan PKBM yang mengunduh rapor pendidikan lebih kecil dari kumlah satuan yang login. Hal ini berarti tidak semua satuan pendidikan yang sudah login mengunduh rapor pendidikan, ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dan BPMP untuk melakukan pendampingan selanjutnya.

# 3. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Target jumlah satuan SKB melakukan unduh rapor pendidikan yang ditetapkan UPT sebesar 90% jika dilihat di tabel 2 dapat dicapai bahkan melewati target yang ditetapkan yaitu 95% (ada kenaikan sebesar 5% dari target). Jika dilihat peningkatan setiap bulan, maka capaian tertinggi terjadi pada bulan Mei dengan delta sebesar 27%.

### 4. Sekolah Luar Biasa (SLB)

Dari 76 satuan pendidikan SLB yang ada di Provinsi Sumatra Utara, target UPT 100% SLB melakukan unduh rapor pendidikan dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan dengan delta peningkatan capaian tertinggi pada bulan Mei sebesar sebesar 35%.

# 5. Jenjang Satuan Dasmen (SD, SMP, dan SMA/SMK)

Pada project Charter UPT jenjang pendidikan dasar dan menengah target UPT seluruh satuan pendidikan baik SD, SMP, SMA dan SMK (100%) diharapkan mengunduh rapor pendidikan dan melakukan eksplorasi hasil asesmen nasional yang telah diikuti, namun dari tabel 2 dapat dilihat bahwa target ini dapat dicapai untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, sementara untuk SMK capaiannya sebesar 98%.

Dari keseluruhan jenjang dalam mengunduh rapor, dapat disimpulkan, capaian delta tertinggi untuk unduh pada jenjang SMA sebesar 46% pada bulan Mei dan capaian terbaik juga pada jenjang SMA dimana pada bulan September seluruh satuan pendidikan SMA (100%) sudah mengunduh rapor. Capaian tersebut diatas, jika dihubungkan dengan target PDM 04 A yang ditentukan sebelumya adalah seperti di uraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.12 Capaian Target PDM 04A

			Hasil	Keteranga	an Capaian
No	Satuan	Target Capaian	Capaian	Tercapai	Tidak Tercapai
1	PAUD	90% Login	95%	$\checkmark$	
2	PAUD	80% Unduh Eksplorasi	80%	$\checkmark$	
3	Dasmen	100% Login	100%	$\checkmark$	
4	Dasmen	90% Unduh/Eksplorasi	100%	$\checkmark$	
5	Dasmen	90% Delta Positif		$\checkmark$	
6	SLB	100% Login	100%	$\checkmark$	
7	SLB	100% Unduh/Eksplorasi	100%	$\checkmark$	
8	SLB	85% Delta Positif		$\checkmark$	
9	SKB	100% Login	95%	$\checkmark$	
10	SKB	90% Unduh/Eksplorasi	95%	$\checkmark$	
11	SKB	70% Delta Positif		$\checkmark$	
12	PKBM	80% Login	95%	$\checkmark$	

#### f. Pelaksanaan Pembinaan Kemitraan Daerah

Dalam pelaksanaan pembinaan kemitraan, BPMP Provinsi Sumatera Utara diantaranya melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Workshop Group Coaching BPMP Provinsi Sumatera Utara Batch I dan II
- Audiensi Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah 12 Kab Kota
- Advokasi dan Pendampingan Percepatan pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) dan Tim Pencegahan Penangan kekerasan di lingkungan Satuan pendidikan
- Sosialisasi Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah untuk Dinas Pendidikan
- Pemantauan Pelaksanaan PPDB Tahun 2024 Jenjang SMA, SMP dan SD
- Refleksi, Penyusunan Rekomendasi Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Evaluasi Kebijakan PPDB
- Bimtek PPKSP

### g. Pelaksanaan Pembinaan Digitalisasi Sekolah

Dalam pelaksanaan pembinaan digitalisasi sekolah, BPMP Provinsi

Sumatera Utara dalam rangka pencapaian target kinerja telah melaksanakan program kegiatan sebagai berikut:

- Bimbingan Teknis ARKAS/MARKAS Dan Sosialisasi Program SIAR pada
   Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan
- Advokasi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait penggunaan ARKAS 4.0 BOP
- Advokasi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait penggunaan SIPLAH semester 2
- Bimtek Satuan Pendidikan terkait fitur rencana belanja integrasi ARKAS
   SIPLah
- Pemantauan Dinas Pendidikan Memanfaatkan Modul Integrasi MARKAS-SIPD Untuk Perencanaan Dan Pelaporan
- Advokasi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait pelaporan
   BOSP melalui ARKAS Tahun 2023
- Advokasi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait pelaporan
   BOSP melalui ARKAS tahap 1 TA 2024
- Pendampingan Kepada Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan yang memiliki komunitas SIAR
- Sosialisasi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait perencanaan penggunaan BOSP pada T-1
- Advokasi Dan Pemantauan Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan
   Terkait Penerima BOSP Melakukan Perencanaan pada T-1
- Advokasi dan Pendampingan Percepatan Penyaluran dana BOS Tahap L Tahun 2024
- Pemantauan Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan Terkait Platform SDS (Arkas/Siplah) oleh UPT
- Pelaksanaan pelatihan/bimtek Optimalisasi belajar.id dan Chromebook pada Pemerintah daerah
- Pendampingan PEMDA Dalam Percepatan Peningkatan Akses Pendidikan
- Uji Petik Anomali Data

- Uji petik peningkatan kualitas data dapodik relaksasi AA

### h. Pelaksanaan Strategi Publikasi dan Komunikasi

Berdasarkan target objektif yang ditetapkan, secara umum pelaksanaan strategi Publikasi dan komunikasi BPMP Provinsi Sumatera Utara dinyatakan berhasil baik secara target kinerja maupun anggaran. adapun target yang capaian pelaksanaan strategi publikasi dan komunikasi oleh BPMP Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

1. Dalam 1 tahun minimal terdapat 48 konten program prioritas yang diunggah.

Terkait target ini, BPMP Provinsi Sumatera Utara menggunggah lebih dari 48 konten program prioritas pada media sosial UPT. Dalam mencapai target tersebut terdapat tantangan yang dihadapi yaitu dalam hal mempromosikan kebijakan merdeka belajar kepada khalayak ramai serta belum optimalnya perangkat, serta sarana dan prasarana publikasi dan komunikasi yang ada. sehingga untuk mencapai target tersebut BPMP Provinsi Sumatera Utara menyusun pilar konten, rencana konten dan manajemen media sosial UPT berdasarkan pilar konten unit utama serta melakukan pengadaan sarana dan prasarana publikasi dan komunikasi.

2. Dalam 1 tahun minimal ada 2 komunitas yang dilibatkan dalam komunikasi program prioritas.

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan kumpul komunitas lokal dan melibatkan telah melibatkan banyak pihak terkait dalam rangka komunikasi program prioritas Kemendikbud.

#### i. Pelaksanaan Pemulihan Pembelajaran

Sesuai dengan tugas dan fungsinya bahwa BPMP merupakan Unit Pelaksana Teknis Kemendikdasmen yang memastikan kebijakan dan program di daerah dapat terimplementasikan sesuai dengan target capaian. Dalam rangka pemulihan pembelajaran juga merujuk pada kolaborasi antara berbagai pihak baik pemerintah, organisasi internasional, lembaga pendidikan, sektor swasta, maupun masyarakat sipil.

Salah satu kebijakan dan program yang harus diimplementasikan adalah

membangun kolaborasi dengan mitra pembangunan dalam rangka mengatasi masalah pemulihan dan transformasi pembelajaran. Oleh karena itu BPMP Provinsi Sumut melakukan advokasi dan fasilitasi Kerjasama mitra pembangunan dengan pemerintah daerah.

Membangun kemitraan dengan Mitra Pembangunan Pendidikan adalah salah satu kebijakan Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam rangka untuk mensupport pemulihan dan transformasi pembelajaran. Mitra pembangunan untuk pemulihan dan transformasi pembelajaran merujuk pada kolaborasi antara berbagai pihak --baik pemerintah, organisasi internasional, lembaga pendidikan, sektor swasta, maupun masyarakat sipil.

Dalam kontkes ini, Mitra Pembangunan berperan dalam, *pertama*, Penyediaan Sumber Daya: Mendukung pendanaan, teknologi, dan pelatihan untuk guru dan siswa. *Kedua*, Inovasi Teknologi: Meningkatkan akses pembelajaran digital dan solusi teknologi pendidikan. Dan *Ketiga*, Penguatan Kebijakan: Membantu pemerintah dalam merancang kebijakan berbasis data untuk pembelajaran yang lebih efektif.

Langkah-langkah yang dilakukan BPMP Provinsi Sumatera Utara dalam rangka penjaringan mitra pembangunan adalah sebagai berikut:

- 1. Identifikasi calon mitra
- 2. Membangun komunikasi awal dengan calon Mitra Pembangunan
- 3. Lokakarya Mitra Pembangunan
- 4. Pendampingan Mitra Pembangunan
- 5. MoU mitra pembangunan dengan Pemerintah Dearah.

BPMP Provinsi Sumatera Utara telah mengundang calon mitra pembangunan untuk mengikuti kegiatan yang bertajuk Lokakarya Sosialisasi Program Mitra Pembangunan PDM-10 BPMP Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19-21 Juni 2024, bertempat di Aula Sisingamangaraja, BPMP Provinsi Sumatera Utara. Melalui lokakarya ini juga turut disampaikan program-program kemitraan yang dapat dilakukan

dan didukung oleh mitra pembangunan. Berdasarkan target objektif UPT penambahan minimal 5 mitra pembangunan untuk peningkatan literasi dan numerasi dapat dikatakan tercapai, karena melalui kegiatan lokakarya Sosialisasi Program Mitra Pembangunan terdata lebih dari 5 mitra pembangunan yang melakuakan kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan dalam rangka penguatan literasi dan numerasi guna pemulihan pembelajaran pada satuan pendidikan di kabupaten/kota provinsi Sumatera Utara.

Selain yang tersebut diatas, dalam rangka pelaksanaan pemulihan pembelajaran, BPMP Provinsi Sumatera Utara diantaranya melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Kick Off Kampus Mengajar Angkatan-7
- Kick Off Pelepasan Kampus Mengajar Angkatan-8
- Monitoring dan evaluasi Program Pemulihan dan Tranformasi Pembelajaran di semua jenjang
- Pendampingan penguatan intervensi pemulihan pembelajaran oleh UPT tahap I
- Supervisi program pemulihan pembelajaran tahap I oleh UPT
- Supervisi program pemulihan pembelajaran tahap II oleh UPT
- Pengimbasan Peningkatan Literasi dan Numerasi Oleh UPT
- Koordinasi dengan BB/BGP dan Balai/Kantor Bahasa untuk penguatan program peningkatan literasi dan numerasi oleh UPT
- Peningkatan kapasitas fasilitator daerah untuk penguatan program peningkatan literasi dan numerasi oleh UPT Tahun 2024
- Peningkatan Kapasitas Fasilitator Daerah Untuk Penguatan Program Literasi dan Numerasi oleh UPT

#### j. Pelaksanaan Gerakan Sekolah Sehat

Secara umum Program Pelaksanaan Gerakan Sekolah Sehat (GSS) oleh BPMP Provinsi Sumatera Utara terlaksana hampir 100% dengan rincian target dan capaian sebagai berikut:

1. Dari target 80% satuan pendidikan di provinsi Sumatera Utara mengetahui

GSS diperoleh tingkat capaian sebesar 90%, hal ini diukur melalui asesmen terhadap GSS pada satuan pendidikan di provinsi Sumatera Utara;

- 2. Dari Target 30% satuan pendidikan mengimplementasikan GSS: Sehat bergizi, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat lingkungan dan sehat jiwa diperoleh tingkat capaian sebesar 98%, hal ini diukur melalui asesmen terhadap GSS pada satuan pendidikan di provinsi Sumatera Utara;
- 3. Dari Target 50% satuan pendidikan binaan dengan status kuning meningkat kategori status kesehatannya menjadi hijau di tahun 2024 untuk sehat bergizi, sehat fisik dan sehat imunisasi diperoleh tingkat capaian sebesar 100%, hal ini dipantau melalui dashboard yang menunjukkan bahwa seluruh satuan pendidikan binaan mengimplementasikan sehat bergizi, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat lingkungan dan sehat jiwa dengan status seluruhnya hijau;
- 4. Dari Target 50% satuan pendidikan binaan dengan status merah meningkat kategori status kesehatannya menjadi kuning di tahun 2024 untuk sehat lingkungan dan sehat jiwa diperoleh tingkat capaian sebesar 100%, hal ini dipantau melalui dashboard yang menunjukkan bahwa seluruh satuan pendidikan binaan mengimplementasikan sehat bergizi, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat lingkungan dan sehat jiwa dengan status seluruhnya hijau;
- 5. Dari Target 100% Satuan Pendidikan binaan jenjang SD, SMP, SMA/SMK dan SLB terpetakan status kebugarannya diperoleh tingkat capaian sebesar 90%, hal ini dipantau melalui dashboard yang menunjukkan bahwa satuan pendidikan binaan jenjang SD, SMP, SMA/SMK dan SLB telah melaksanakan Tes Kebugaran Siswa Indonesia (TKSI).

#### k. Pelaksanaan Transisi PAUD-SD

Secara umum Program Pelaksanaan Transisi PAUD-SD oleh BPMP Provinsi Sumatera Utara terlaksana hampir 100%, dengan indikator ketercapaian:

 Satuan pendidikan memahami ketentuan dan prosedur PPDB jenjang SD dan MPLS serta pembelajaran yang tidak mensyaratkan calistung

- 2. Satuan pendidikan / guru kelas 1 dan kelas 2 memahami konsep dan praktik penguatan 6 fondasi anak dalam penyusunan rencana pembelajaran
- 3. Satuan pendidikan / guru kelas 1 dan kelas 2 memahami target pencapaian kemampuan 6 fondasi anak dalam pembelajaran,
- 4. Satuan PAUD dan SD kelas 1 dan 2 Melakukan Penguatan Pembelajaran pada Masa MPLS.

Adapun kegiatan untuk mendukung ketercapaian tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- Advokasi dan Pendampingan Kebijakan dan Produk Pembelajaran
   Transisi PAUD-SD kepada Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian
   Agama Kabupaten/Kota
- Advokasi dan Pendampingan Kebijakan dan Produk Pembelajaran
   Transisi PAUD-SD kepada Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian
   Agama Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sosialisasi kebijakan dan penguatan MPLS Transisi
   PAUD-SD kepada Pokja Bunda PAUD
- Diseminasi surat pemberitahuan SPV PDM09 ke Dinas Pendidikan untuk advokasi transisi PAUD SD
- Advokasi Pemenuhan 8 Indikator Layanan Esensial Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)



# A.2 Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya Tata Kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Sasaran Kegiatan 2 atau disebut SK 2 terdapat perbedaan penyebutan antara tahun 2020-2021 dan 2022-2024, Pada Tahun 2020- 2021 Sasaran Kegiatan 2 [SK 2] adalah Terwujudnya tata Kelola LPMP yang baik tercapai pada tahun 2022-2024 Sasaran Kegiatan 2 [SK 2] adalah Meningkatnya penjaminan mutu Pendidikan di seluruh jenjang pendidikan, walaupun terdapat perbedaan

penyebutan tetapi SK 2 untuk tahun 2020-2024 sama terbagi menjadi 2 Indikator Kinerja. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari Biro Perencanaan dan Penganggaran Kemendikbudristek yang bersumber dari hasil penilaian Itjen Kemendikbudristek dan website e-monev Kemenkeu diperoleh data sebagai berikut:

1. [IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara pada tahun 2020 yang merupakan baseline renstra berhasil mencapai target renstra yang ditetapkan yaitu memperoleh predikat BB, tahun 2021 juga masih mencapai target yaitu memperoleh predikat BB, tahun 2022 target renstra A tetapi masih memperoleh predikat BB, pada tahun 2023 mencapai target dan mengalami peningkatan mendapat predikat A dan pada tahun 2024 juga masih mencapai target renstra dengan mendapat predikat A.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara dari tahun 2020 sampai tahun 2024 terus mengalami peningkatan.

2. [IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAK/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara pada tahun 2020 yang merupakan base line renstra memperoleh nilai sebesar 95,43 dari target 81, tahun 2021 memperoleh nilai 94,66 dari target 82, tahun 2022 memperoleh nilai 97,67 dari target 83, pada tahun 2023 memperoleh nilai 94,49 dari target 84 dan pada tahun 2024 memperoleh nilai 98,24 dari target 94,50.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAK/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara dari tahun 2020 sampai tahun 2024 walaupun mengalami penurunan pada tahun 2021 dan tahun 2023 tetapi masih mencapai target renstra yang ditetapkan.



# A.2.1 Definisi Operasional dan Metode Perhitungan Kinerja

# Indikator Kinerja kegiatan 2.1

Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

- 1. Definisi Operasional
  - Predikat penilaian yang dapat menggambarkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- 2. Metode Perhitungan Kinerja

(30% x Nilai Perencanaan Kinerja) + (30% x Nilai Pengukuran Kinerja) + (15% x Nilai Pelaporan Kinerja) + (25% x Nilai Evaluasi Kinerja)

Tabel 3.13 Capaian Kinerja berdasarkan IKK 2.1

Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024									
Realisasi	Realisasi	Target Akhir Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi Nasional	Capaian Kinerja BPMP dibanding Nasional				
BB	А	А	А	А	-	-	-				

Grafik 3.16 Capaian Peringkat SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Utara



- 3. Program Kegiatan pendukung IKK 2.1
  - Beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024 dalam upaya mendukung pencapaian target IKK. 2.1 ini antara lain:
  - a. Menidaklanjuti laporan hasil evaluasi (LHE) SAKIP tahun 2023 diantaranya yaitu mempublikasikan Dokumen Rencana Kerja Tahunan dalam laman BPMP Provinsi Sumatera Utara.
  - b. Melaksanakan rapat program kerja BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024
  - c. Melaksanakan Kegiatan Internalisasi Program Kerja BPMP Provinsi Sumatera Utara dan Penyusunan SKP Tahun 2024
  - d. Penandatanganan Pakta Integritas pegawai BPMP Provinsi Sumatera Utara
  - e. Rapat Evaluasi kegiatan setiap awal bulan untuk mengevaluasi capaian kinerja dari kegiatan yang telah dilaksanakan pada bulan sebelumnya.
  - f. Rapat Tim Pembangunan ZI WBK
  - g. Pembentukan Komunitas belajar internal BPMP Provinsi Sumatera Utara
  - h. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik dalam Upaya Peningkatan Layanan publik BPMP Provinsi Sumatera Utara
  - i. Melaksanakan rapat Evaluasi SAKIP secara berkala

### Indikator Kinerja kegiatan 2.2

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAK/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara

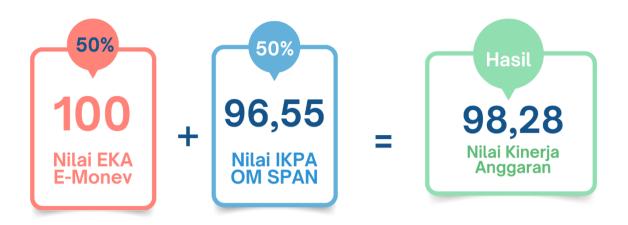
- 1. Definisi Operasional
  - a. Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai capaian kinerja atas penggunaan anggaran kementerian/lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran;
  - b. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi;
  - c. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis atas kinerja anggaran dengan mengukur variabel-variabel capaian output, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

### 2. Metode Perhitungan Kinerja

Tabel 3.14 Capaian Kinerja Anggaran

Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024								
Realisasi	Realisasi	Target Akhir Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi Nasional	Capaian Kinerja BPMP dibanding Nasional			
97,67	94,49	85	94,50	98,26	103,97	-	-			

Gambar 3.3 Capaian IKK 2.2



Grafik 3.17 Capaian Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Sumatera Utara



Berdasarkan penilaian dari Kementerian Keuangan melalui website e-monev dan om-span maka nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L untuk tahun 2024 sebesar 98,26. Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa target untuk IKK.2.2 telah tercapai dengan sangat baik atau melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 94,50 tercapai realisasi 98,26, dengan persentase capaian sebesar 103,97%. Capaian realisasi nilai kinerja anggaran sebesar 98,28 diperoleh dari akumulasi nilai EKA sebesar 100 dan nilai IKPA sebesar 96,55.

- 3. Program Kegiatan Pendukung Capaian IKK 2.1

  Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024 dalam upaya mendukung pencapaian target IKK. 2.2 ini antara lain:
  - a. Rapat evaluasi rutin pencapaian kinerja anggaran secara berkala;
  - b. Merevisi halaman III DIPA sesuai dengan jadwal program dan kegiatan yang telah disusun oleh para PIC;
  - c. Menyampaikan laporan capaian output pada aplikasi SAKTI tepat waktu;
  - d. Menyampaikan laporan capaian kegiatan melalui aplikasi e-monev Bappenas yang dilaksanakan setiap bulan;
  - e. Mengoptimalkan pemakaian kartu kredit pemerintah (KKP);
  - f. Penyelesaian pembayaran tagihan belanja pemerintah tetap waktu;



#### A.2.2 Tren capaian kinerja dari tahun 2024

Seperti dijelaskan diatas bahwa Sasaran Kegiatan 2 atau disebut SK 2 terdapat perbedaan penyebutan antara tahun 2020-2021 dan 2022-2024, Pada Tahun 2020-2021 Sasaran Kegiatan 2 [SK 2] adalah Terwujudnya tata Kelola LPMP yang baik tetapai pada tahun 2022-2024 Sasaran Kegiatan 2 [SK 2] adalah Meningkatnya penjaminan mutu Pendidikan di seluruh jenjang pendidikan, walaupun terdapat perbedaan penyebutan tetapi SK 2 untuk tahun 2020-2024 sama terbagi menjadi 2 Indikator Kinerja. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari Biro Perencanaan dan Penganggaran Kemendikbud Ristek yang bersumber dari hasil penilaian Itjen Kemendikbud Ristek dan website e-monev Kemenkeu, pada grafik berikut ditampilkan Tren capaian kinerja untuk kedua indikator kinerja kegiatan:



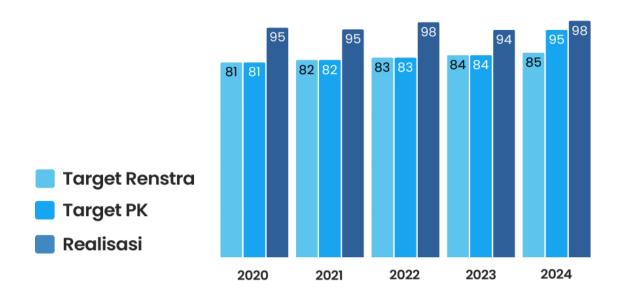
Dari grafik diatas dapat dilihat tren capain kinerja [IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara dari tahun 2020 sampai 2024 menunjukan tren positif karena dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. pada tahun 2020 yang merupakan base line renstra berhasil mencapai target renstra yang ditetapkan yaitu memperoleh predikat BB, tahun 2021 juga masih mencapai target yaitu memperoleh predikat BB, tahun 2022 target renstra A tetapi masih memperoleh predikat BB, pada tahun 2023 mencapai target dan mengalami peningkatan mendapat predikat A dan pada tahun 2024 juga masih mencapai target renstra dengan mendapat predikat A.

Tabel 3.15 Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2020-2024

Tahun	Target Renstra	Target PK	Realisasi
2020	81	81	95,43
2021	82	82	94,66
2022	83	83	97,67
2023	84	84	94,49
2024	85	94,50	98,28

Pada tahun 2024 terdapat perbedaan target renstra dan target PK, hal ini disebabkan karena capaian IKK 2.2 pada tahun 2023 sebesar 94,49 melebihi target renstra, sehingga target PK tahun 2024 yang ditetapkan pada awal tahun berpedoman pada capaian IKK 2.2 pada tahun 2023.

Grafik 3.19 Tren Capaian Kinerja IKK 2.2



Dari grafik diatas dapat kita lihat tend capaian indikator kinerja kegiatan [IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAK/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara, mengalami naik turun dari tahun 2020 sampai 2024, pada tahun 2021 dan tahun 2023 walaupun mengalami penurunan tetapi masih mencapai target renstra yang ditetapkan. pada tahun 2020 yang merupakan baseline renstra memperoleh nilai sebesar 95,43 dari target 81, tahun 2021 memperoleh nilai 94,66 dari target 82, tahun 2022 memperoleh nilai 97,67 dari target 83, pada tahun 2023 memperoleh nilai 94,49 dari target 84 dan pada tahun 2024 memperoleh nilai 98,24 dari target 94,50.

#### B. Realisasi Program/Agenda Prioritas

Realisasi Program/Agenda Prioritas BPMP Provinsi Sumatera Utara secara detail termuat dalam Kertas Kerja RKAKL revisi bulan Desember yang memuat Kertas Kerja dan realisasinya. Selain itu, realisasi program/Agenda prioritas BPMP Provinsi Sumatera Utara termuat dalam *Microsoft Project* BPMP Provinsi Sumatera Utara dengan menjabarkan detail kegiatan per-PDM UPT. Secara umum dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 3.16 Program dan Kegiatan

No	Kode	Komponen/Sub Komponen
1	6397.QDB.750-091	Pelaksanaan Pembinaan Kurikulum Merdeka
1.1	6397.QDB.750-091.BA	PDM-02 Melaksanakan Advokasi Peningkatan Kualiatas Proses Pelaksanaan Kurikulum Merdeka bagi Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan
1.2	6397.QDB.750-091.BC	PDM-02 Refleksi IKM Tahap 1
1.3	6397.QDB.750-091.BE	PDM-02 Pemantauan dan evaluasi peran mitra pembangunan IKM
1.4	6397.QDB.750-091.BK	PDM-02 Melaksanakan persiapan festival kurikulum merdeka (pameran berbagai hasil karya seperti foto, artikel, video, festifal budaya, parade, talkshow, dengan tema memperkuat ekosistem positif IKM)
1.5	6397.QDB.750-091.BL	PDM-02 Visitasi dan Pendampingan iKM bagi Sekolah Pelaksana Kurikulum Merdeka Yang Materinya didasarkan pada hasil Refleksi Pelaksanaan IKM Tahun 2023/2024
2	6397.QDB.750-092	Pelaksanaan Pembinaan Asesmen Nasional
2.1	6397.QDB.750-092.HA	PDM-06 Penguatan dan Advokasi Bagi Tim Posko/Helpdesk AN dan Sulingjar 2024
2.2	6397.QDB.750-092.HC	PDM-06 Pemantauan Pelaksanaan Survei Lingkungan Belajar Jenjang PAUD oleh UPT
2.3	6397.QDB.750-092.HF	PDM-06 Workshop Kebijakan Ujian Kesetaraan UK Regional I
2.4	6397.QDB.750-092.HI	PDM-06 Pelaksanaan pemantauan/monitoring pelaksanaan Ujian Kesetaraan (UK) tahun 2024.
2.5	6397.QDB.750-092.HM	PDM-06 Pelaksanaan pemantauan/monitoring persiapan dan advokasi pelaksanaan AN tahun 2024.

2.6	6397.QDB.750-092.HN	PDM-06 Pemantauan Pelaksanaan Asesmen Nasional Sederajat Tahun 2024
2.7	6397.QDB.750-092.HQ	PDM-06 Pelaksanaan pemantauan/monitoring pelaksanaan AN/Sulingjar tahun 2024.
3	6397.QDB.750-093	Pelaksanaan Pembinaan Transfer Daerah
3.1	6397.QDB.750-093.JC	PDM-08 Advokasi pemda dengan komitmen rendah dengan BB/BPMP
3.2	6397.QDB.750-093.QA	POKJA Advokasi kebijakan Dana Tranfer Daerah
3.3	6397.QDB.750-093.QB	POKJA Pendampingan penatausahaan Dana Transfer Daerah
3.4	6397.QDB.750-093.QF	POKJA Internalisasi Program Kegiatan TA 2024
3.5	6397.QDB.750-093.QG	POKJA Pekan Olahraga dan Seni dan Kombel Antar UPT
3.6	6397.QDB.750-093.QH	Kegiatan Simulasi Kebakaran pada Satuan Kerja
3.7	6397.QDB.750-093.QI	Sosialisasi Program Kerja Lembaga kepada Stakeholder Tahun 2024
3.8	6397.QDB.750-093.QJ	Pameran Bulan Merdeka Belajar
3.9	6397.QDB.750-093.QK	Semarak Kemerdekaan pada Lembaga
3.10	6397.QDB.750-093.QL	Bimtek Pembangunan ZI WBK Lembaga
4	6397.QDB.750-094	Pelaksanaan Pembinaan Sekolah Penggerak
4.1	6397.QDB.750-094.AA	PDM-01 Optimalisasi Pengawas Sekolah Sebagai Pendamping Satuan Pendidikan
4.2	6397.QDB.750-094.AF	PDM-01 Workshop Pengimbasan Oleh PSP Angkatan I
4.3	6397.QDB.750-094.AG	PDM-01Kegiatan Pemetaan Sekolah Pelaksana PSP dan Sekolah Imbas

<ul> <li>6397.QDB.750-094.AM</li> <li>PDM-01 Observasi Level Komitmen Pemda (Dasbor UPT) UPT</li> <li>6397.QDB.750-094.AO</li> <li>PDM-03A Visitasi dan Wawancara Obsevasi Terkait Pengimbasan PMM, Non PMM, BOSP Kinerja, Adaptasi Kurikulum dan Pendampingan Daerah dalam Fasilitasi Kombel</li> <li>6397.QDB.750-094.AP</li> <li>PDM-01 Monev pemanfaatan BOSP Kinerja, Adaptasi Kurikulum dan Pendampingan Daerah dalam Fasilitasi Kombel</li> <li>6397.QDB.750-094.AQ</li> <li>PDM-01 Koordinasi PMO dengan Pemda</li> <li>6397.QDB.750-094.AS</li> <li>PDM-12 Persiapan Sosialisasi dan Advokasi Pembentukan Unit Layanan Disabilitas di Daerah</li> <li>6397.QDB.750-095</li> <li>Pelaksanaan Pembinaan Perencanaan Berbasis Data</li> <li>6397.QDB.750-095.EB</li> <li>PDM-04A Pelaksanaan pendampingan satuan pendidikan yang belum mengakses rapor pendidikan oleh UPT</li> <li>6397.QDB.750-095.ED</li> <li>PDM-04A Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi PBD Satpen oleh UPT Jenjang SMP dan SMA</li> <li>6397.QDB.750-095.EE</li> <li>PDM-04A Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi PBD Satpen oleh UPT di Wilayah Kab/Kota</li> <li>6397.QDB.750-095.FE</li> <li>PDM-04A Pelaksanaan Refleksi Implementasi PBD Satpen oleh UPT (Prov/Kab/Kota)</li> <li>6397.QDB.750-095.FA</li> <li>PDM-04B Pendampingan Rakortek Kab/Kota oleh Bappeda Provinsi oleh UPT</li> <li>6397.QDB.750-095.FB</li> <li>PDM-04B Pendampingan Perencanaan dan Penganggaran Pemda terkait SPM Pendidikan oleh UPT</li> <li>6397.QDB.750-095.FB</li> <li>PDM-04B Pendampingan Realisasi SPM</li> </ul>			
Terkait Pengimbasan PMM, Non PMM, BOSP Kinerja, Adaptasi Kurikulum dan Pendampingan Daerah dalam Fasilitasi Kombel  4.6 6397.QDB.750-094.AP PDM-01 Monev pemanfaatan BOSP Kinerja, Adaptasi Kurikulum dan Pendampingan Daerah dalam Fasilitasi Kombel  4.7 6397.QDB.750-094.AQ PDM-01 Koordinasi PMO dengan Pemda  4.8 6397.QDB.750-094.AS PDM-12 Persiapan Sosialisasi dan Advokasi Pembentukan Unit Layanan Disabilitas di Daerah  5 6397.QDB.750-095 Pelaksanaan Pembinaan Perencanaan Berbasis Data  5.1 6397.QDB.750-095.EB PDM-04A Pelaksanaan pendampingan satuan pendidikan oleh UPT  5.2 6397.QDB.750-095.EC PDM-04A Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi PBD Satpen oleh UPT Jenjang SMP dan SMA  5.3 6397.QDB.750-095.ED PDM-04A Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi PBD Satpen oleh UPT di Wilayah Kab/Kota  5.4 6397.QDB.750-095.EE PDM-04A Pelaksanaan Refleksi Implementasi PBD Satpen oleh UPT (Prov/Kab/Kota)  5.5 6397.QDB.750-095.FA PDM-04B Pendampingan Rakortek Kab/Kota oleh Bappeda Provinsi oleh UPT  5.6 6397.QDB.750-095.FB PDM-04B Pendampingan Perencanaan dan Penganggaran Pemda terkait SPM Pendidikan oleh UPT	4.4	6397.QDB.750-094.AM	
Adaptasi Kurikulum dan Pendampingan Daerah dalam Fasilitasi Kombel  4.7 6397.QDB.750-094.AQ PDM-01 Koordinasi PMO dengan Pemda  4.8 6397.QDB.750-094.AS PDM-12 Persiapan Sosialisasi dan Advokasi Pembentukan Unit Layanan Disabilitas di Daerah  5 6397.QDB.750-095 Pelaksanaan Pembinaan Perencanaan Berbasis Data  5.1 6397.QDB.750-095.EB PDM-04A Pelaksanaan pendampingan satuan pendidikan yang belum mengakses rapor pendidikan oleh UPT  5.2 6397.QDB.750-095.EC PDM-04A Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi PBD Satpen oleh UPT Jenjang SMP dan SMA  5.3 6397.QDB.750-095.ED PDM-04A Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi PBD Satpen oleh UPT di Wilayah Kab/Kota  5.4 6397.QDB.750-095.EE PDM-04A Pelaksanaan Refleksi Implementasi PBD Satpen oleh UPT (Prov/Kab/Kota)  5.5 6397.QDB.750-095.FA PDM-04B Pendampingan Rakortek Kab/Kota oleh Bappeda Provinsi oleh UPT  5.6 6397.QDB.750-095.FB PDM-04B Pendampingan Perencanaan dan Penganggaran Pemda terkait SPM Pendidikan oleh UPT	4.5	6397.QDB.750-094.AO	Terkait Pengimbasan PMM, Non PMM, BOSP Kinerja, Adaptasi Kurikulum dan Pendampingan Daerah dalam Fasilitasi
4.8 6397.QDB.750-094.AS PDM-12 Persiapan Sosialisasi dan Advokasi Pembentukan Unit Layanan Disabilitas di Daerah  5 6397.QDB.750-095 Pelaksanaan Pembinaan Perencanaan Berbasis Data  5.1 6397.QDB.750-095.EB PDM-04A Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi PBD Satpen oleh UPT Jenjang SMP dan SMA  5.3 6397.QDB.750-095.ED PDM-04A Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi PBD Satpen oleh UPT di Wilayah Kab/Kota  5.4 6397.QDB.750-095.EE PDM-04A Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi PBD Satpen oleh UPT di Wilayah Kab/Kota  5.4 6397.QDB.750-095.EE PDM-04A Pelaksanaan Refleksi Implementasi PBD Satpen oleh UPT (Prov/Kab/Kota)  5.5 6397.QDB.750-095.FA PDM-04B Pendampingan Rakortek Kab/Kota oleh Bappeda Provinsi oleh UPT  5.6 6397.QDB.750-095.FB PDM-04B Pendampingan Perencanaan dan Penganggaran Pemda terkait SPM Pendidikan oleh UPT	4.6	6397.QDB.750-094.AP	Adaptasi Kurikulum dan Pendampingan
Pembentukan Unit Layanan Disabilitas di Daerah  5 6397.QDB.750-095  Pelaksanaan Pembinaan Perencanaan Berbasis Data  5.1 6397.QDB.750-095.EB  PDM-04A Pelaksanaan pendampingan satuan pendidikan yang belum mengakses rapor pendidikan oleh UPT  5.2 6397.QDB.750-095.EC  PDM-04A Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi PBD Satpen oleh UPT Jenjang SMP dan SMA  5.3 6397.QDB.750-095.ED  PDM-04A Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi PBD Satpen oleh UPT di Wilayah Kab/Kota  5.4 6397.QDB.750-095.EE  PDM-04A Pelaksanaan Refleksi Implementasi PBD Satpen oleh UPT (Prov/Kab/Kota)  5.5 6397.QDB.750-095.FA  PDM-04B Pendampingan Rakortek Kab/Kota oleh Bappeda Provinsi oleh UPT  5.6 6397.QDB.750-095.FB  PDM-04B Pendampingan Perencanaan dan Penganggaran Pemda terkait SPM Pendidikan oleh UPT	4.7	6397.QDB.750-094.AQ	PDM-01 Koordinasi PMO dengan Pemda
Berbasis Data  5.1 6397.QDB.750-095.EB PDM-04A Pelaksanaan pendampingan satuan pendidikan yang belum mengakses rapor pendidikan oleh UPT  5.2 6397.QDB.750-095.EC PDM-04A Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi PBD Satpen oleh UPT Jenjang SMP dan SMA  5.3 6397.QDB.750-095.ED PDM-04A Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi PBD Satpen oleh UPT di Wilayah Kab/Kota  5.4 6397.QDB.750-095.EE PDM-04A Pelaksanaan Refleksi Implementasi PBD Satpen oleh UPT (Prov/Kab/Kota)  5.5 6397.QDB.750-095.FA PDM-04B Pendampingan Rakortek Kab/Kota oleh Bappeda Provinsi oleh UPT  5.6 6397.QDB.750-095.FB PDM-04B Pendampingan Perencanaan dan Penganggaran Pemda terkait SPM Pendidikan oleh UPT	4.8	6397.QDB.750-094.AS	Pembentukan Unit Layanan Disabilitas di
satuan pendidikan yang belum mengakses rapor pendidikan oleh UPT  5.2 6397.QDB.750-095.EC PDM-04A Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi PBD Satpen oleh UPT Jenjang SMP dan SMA  5.3 6397.QDB.750-095.ED PDM-04A Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi PBD Satpen oleh UPT di Wilayah Kab/Kota  5.4 6397.QDB.750-095.EE PDM-04A Pelaksanaan Refleksi Implementasi PBD Satpen oleh UPT (Prov/Kab/Kota)  5.5 6397.QDB.750-095.FA PDM-04B Pendampingan Rakortek Kab/Kota oleh Bappeda Provinsi oleh UPT  5.6 6397.QDB.750-095.FB PDM-04B Pendampingan Perencanaan dan Penganggaran Pemda terkait SPM Pendidikan oleh UPT	5	6397.QDB.750-095	
Evaluasi Implementasi PBD Satpen oleh UPT Jenjang SMP dan SMA  5.3 6397.QDB.750-095.ED PDM-04A Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi PBD Satpen oleh UPT di Wilayah Kab/Kota  5.4 6397.QDB.750-095.EE PDM-04A Pelaksanaan Refleksi Implementasi PBD Satpen oleh UPT (Prov/Kab/Kota)  5.5 6397.QDB.750-095.FA PDM-04B Pendampingan Rakortek Kab/Kota oleh Bappeda Provinsi oleh UPT  5.6 6397.QDB.750-095.FB PDM-04B Pendampingan Perencanaan dan Penganggaran Pemda terkait SPM Pendidikan oleh UPT	5.1	6397.QDB.750-095.EB	satuan pendidikan yang belum mengakses
Evaluasi Implementasi PBD Satpen oleh UPT di Wilayah Kab/Kota  5.4 6397.QDB.750-095.EE PDM-04A Pelaksanaan Refleksi Implementasi PBD Satpen oleh UPT (Prov/Kab/Kota)  5.5 6397.QDB.750-095.FA PDM-04B Pendampingan Rakortek Kab/Kota oleh Bappeda Provinsi oleh UPT  5.6 6397.QDB.750-095.FB PDM-04B Pendampingan Perencanaan dan Penganggaran Pemda terkait SPM Pendidikan oleh UPT	5.2	6397.QDB.750-095.EC	Evaluasi Implementasi PBD Satpen oleh UPT
Implementasi PBD Satpen oleh UPT (Prov/Kab/Kota)  5.5 6397.QDB.750-095.FA PDM-04B Pendampingan Rakortek Kab/Kota oleh Bappeda Provinsi oleh UPT  5.6 6397.QDB.750-095.FB PDM-04B Pendampingan Perencanaan dan Penganggaran Pemda terkait SPM Pendidikan oleh UPT	5.3	6397.QDB.750-095.ED	Evaluasi Implementasi PBD Satpen oleh UPT
oleh Bappeda Provinsi oleh UPT  5.6 6397.QDB.750-095.FB PDM-04B Pendampingan Perencanaan dan Penganggaran Pemda terkait SPM Pendidikan oleh UPT	5.4	6397.QDB.750-095.EE	Implementasi PBD Satpen oleh UPT
Penganggaran Pemda terkait SPM Pendidikan oleh UPT	5.5	6397.QDB.750-095.FA	
5.7 6397.QDB.750-095.FD PDM-04B Pendampingan Realisasi SPM	5.6	6397.QDB.750-095.FB	Penganggaran Pemda terkait SPM
	5.7	6397.QDB.750-095.FD	PDM-04B Pendampingan Realisasi SPM

		Pendidikan Semester I oleh UPT
6	6397.QDB.750-096	Pelaksanaan Pembinaan Kemitraan
6.1	6397.QDB.750-096.GC	PDM-05 Workshop Group Coaching BPMP Provinsi Sumatera Utara Batch I dan II
6.2	6397.QDB.750-096.GD	PDM-05 Audiensi Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah 12 Kab Kota
6.3	6397.QDB.750-096.GI	PDM-05 Advokasi dan Pendampingan Percepatan pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) dan Tim Pencegahan Penangan kekerasan di lingkungan Satuan pendidikan
6.4	6397.QDB.750-096.GO	PDM-05 Sosialisasi Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah untuk Dinas Pendidikan
6.5	6397.QDB.750-096.GQ	PDM-05 Pemantauan Pelaksanaan PPDB Tahun 2024 Jenjang SMA, SMP dan SD
6.6	6397.QDB.750-096.GR	PDM-05 Refleksi , Penyusunan Rekomendasi Pelaksanaan PPDB dan Evaluasi Kebijakan PPDB
6.7	6397.QDB.750-096.GX	PDM-05 Pemantauan dashboard
6.8	6397.QDB.750-096.GZ	PDM-05 Bimtek PPKSP tahap 1
6.9	6397.QDB.750-096.QD	POKJA Pengadaan Konsultan BBPMP/BPMP
6.10	6397.QDB.750-096.QE	PDM-05 Kick Off Kampus Mengajar Angkatan-7
6.11	6397.QDB.750-096.QF	PDM-10 Kick Off Pelepasan Kampus Mengajar Akt 8
7	6397.QDB.750-097	Pelaksanaan Pembinaan Digitalisasi Sekolah
7.1	6397.QDB.750-097.CA	PDM-03A Bimbingan Teknis ARKAS/MARKAS Dan Sosialisasi Program SIAR pada Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan
7.2	6397.QDB.750-097.CC	PDM-03A Advokasi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait penggunaan

		ARKAS 4.0 BOP
7.3	6397.QDB.750-097.CF	PDM-03A Advokasi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait penggunaan SIPLAH semester 2
7.4	6397.QDB.750-097.CG	PDM-03A Bimtek Satuan Pendidikan terkait fitur rencana belanja integrasi ARKAS - SIPLah
7.5	6397.QDB.750-097.CJ	PDM-03A Pemantauan Dinas Pendidikan Memanfaatkan Modul Integrasi MARKAS- SIPD Untuk Perencanaan Dan Pelaporan
7.6	6397.QDB.750-097.CL	PDM-03A Advokasi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait pelaporan BOSP melalui ARKAS Tahun 2023
7.7	6397.QDB.750-097.CN	PDM-03A Advokasi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait pelaporan BOSP melalui ARKAS tahap 1 TA 2024
7.8	6397.QDB.750-097.CP	PDM-03A Pendampingan Kepada Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan yang memiliki komunitas SIAR
7.9	6397.QDB.750-097.CQ	PDM-03A Sosialisasi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait perencanaan penggunaan BOSP pada T-1
7.10	6397.QDB.750-097.CR	PDM-03A Advokasi Dan Pemantauan Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan Terkait Penerima BOSP Melakukan Perencanaan pada T-1
7.11	6397.QDB.750-097.CS	PDM-03A Advokasi dan Pendampingan Percepatan Penyaluran dana BOS Tahap - I Tahun 2024
7.12	6397.QDB.750-097.CT	PDM-03A Pemantauan Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan Terkait Platform SDS (Arkas/Siplah) oleh UPT
7.13	6397.QDB.750-097.CU	Refleksi dan Evaluasi Program Kerja BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024
7.14	6397.QDB.750-097.CV	Penyusunan Program Kerja Pengawasan dan

		Prosedur Operasional Standar (POS) Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan BPMP Provinsi Sumatera Utara
7.15	6397.QDB.750-097.DA	PDM-03B Pelaksanaan pelatihan/bimtek Optimalisasi belajar.id dan Chromebook pada Pemerintah daerah
7.16	6397.QDB.750-097.DB	PDM-03B Pendampingan PEMDA Dalam Percepatan Peningkatan Akses Pendidikan
7.17	6397.QDB.750-097.PA	PDM-14 Sosialisasi dan Koordinasi Kualitas Dapodik dengan Pemda
7.18	6397.QDB.750-097.PB	PDM-14 Uji Petik Anomali Data
7.19	6397.QDB.750-097.PC	PDM-14 Kegiatan Advokasi Peningkatan Capaian Rapor Dapodik
7.20	6397.QDB.750-097.XX	PDM-14 Koordinasi Kelembagaan terkait IKM dan Kualitas Dapodik dengan Satker Paud Dikdas dan Dikmen relaksasi AA
7.21	6397.QDB.750-097.XY	PDM-14 Uji petik peningkatan kualitas data dapodik relaksasi AA
7.22	6397.QDB.750-097.XZ	Festival Literasi dan Numerasi
8	6397.QDB.750-112	Pelaksanaan Strategi Publikasi dan Komunikasi
8.1	6397.QDB.750-112.IA	PDM-07 Menyusun strategi komunikasi kegiatan/event
8.2	6397.QDB.750-112.IC	PDM-07 Paket Pemeliharaan dan pengembangan laman UPT
8.3	6397.QDB.750-112.IP	PDM-07 Upgrading studio podcast/tempat produksi konten di UPT
8.4	6397.QDB.750-112.IQ	PDM-07 Pelatihan teknis videografi, desain grafis, dan teknik jurnalisme
9	6397.QDB.750-115	Pelaksanaan Pemulihan Pembelajaran
9.1	6397.QDB.750-115.LA	PDM-10 Monitoring dan evaluasi Program Pemulihan dan Tranformasi Pembelajaran di

		semua jenjang
9.2	6397.QDB.750-115.LB	PDM-10 Sosialisasi program Mitra Pembangunan Daerah PDM-10 oleh UPT
9.3	6397.QDB.750-115.LC	PDM-10 Pendampingan penguatan intervensi pemulihan pembelajaran oleh UPT tahap I
9.4	6397.QDB.750-115.LD	PDM-10 Supervisi program pemulihan pembelajaran tahap I oleh UPT
9.5	6397.QDB.750-115.LF	PDM-10 Supervisi program pemulihan pembelajaran tahap II oleh UPT
9.6	6397.QDB.750-115.LG	PDM-10 Pengimbasan Peningkatan Literasi dan Numerasi Oleh UPT
9.7	6397.QDB.750-115.LH	PDM-10 Koordinasi dengan BB/BGP dan Balai/Kantor Bahasa untuk penguatan program peningkatan literasi dan numerasi oleh UPT
9.8	6397.QDB.750-115.LI	PDM-10 Peningkatan kapasitas fasilitator daerah untuk penguatan program peningkatan literasi dan numerasi oleh UPT Tahun 2024
9.9	6397.QDB.750-115.LJ	PDM-10 Peningkatan Kapasitas Fasilitator Daerah Untuk Penguatan Program Literasi dan Numerasi oleh UPT
9.10	6397.QDB.750-115.LK	PDM-10 Penambahan minimal 5 mitra pembangunan Kemendikbudristek untuk peningkatan literasi dan/atau numerasi.
10	6397.QDB.750-116	Pelaksanaan Gerakan Sekolah Sehat
10.1	6397.QDB.750-116.MB	PDM-11 Sosialisasi dan Advokasi Penguatan Implementasi Gerakan Sekolah Sehat Bagi Satuan Pendidikan Binaan Gerakan Sekolah Sehat, Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Provinsi dan Kabupaten/Kota
10.2	6397.QDB.750-116.MD	PDM-11 Pendampingan/Supervisi/Visitasi Gerakan Sekolah Sehat (GSS) ke Satuan Pendidikan Binaan Tahun 2024

10.3 6397.QDB.750-116.MF PDM-11 Refleksi dan Evaluasi Implementasi GSS di Satuan Pendidikan Binaan  10.4 6397.QDB.750-116.MI PDM-11 Semarak GSS  10.5 6397.QDB.750-116.MJ PDM-11 Sosialisasi dan Advokasi Pelaksanaan TKSI ke Satuan Pendidikan  10.6 6397.QDB.750-116.MK PDM-11 Pendampingan Pelaksanaan TKSI  11 6397.QDB.750-117 Pelaksanaan Transformasi Pendidikan Khusus  11.1 6397.QDB.750-117.NA PDM-12 Advokasi Kebijakan Layanan Pendidikan Inklusif kepada Pemerintah Daerah  11.2 6397.QDB.750-117.NB PDM-12 Pelaksanaan Advokasi Pemanfaatan Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif di Satuan Pendidikan Unit Layanan Disabilitas di Daerah  12 6397.QDB.750-117.NC PDM-12 Persiapan Sosialisasi dan Advokasi Pembentukan Unit Layanan Disabilitas di Daerah  12 6397.QDB.850-114.KB PDM-09 Advokasi dan Pendampingan Kebijakan dan Produk Pembelajaran Transisi PAUD-SD kepada Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota  12.2 6397.QDB.850-114.KD PDM-09 Koordinasi dan Sosialisasi kebijakan dan penguatan MPLS Transisi PAUD-SD kepada Pokja Bunda PAUD  12.3 6397.QDB.850-114.KF PDM-09 Diseminasi surat pemberitahuan SPV PDM09 ke Dinas Pendidikan untuk advokasi transisi PAUD SD  12.4 6397.QDB.850-114.KG PDM-09 Advokasi Pemenuhan 8 Indikator Layanan Esensial Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)			
10.5 6397.QDB.750-116.MJ PDM-11 Sosialisasi dan Advokasi Pelaksanaan TKSI ke Satuan Pendidikan  10.6 6397.QDB.750-116.MK PDM-11 Pendampingan Pelaksanaan TKSI  11 6397.QDB.750-117 Pelaksanaan Transformasi Pendidikan Khusus  11.1 6397.QDB.750-117.NA PDM-12 Advokasi Kebijakan Layanan Pendidikan Inklusif kepada Pemerintah Daerah  11.2 6397.QDB.750-117.NB PDM-12 Pelaksanaan Advokasi Pemanfaatan Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif di Satuan Pendidikan  11.3 6397.QDB.750-117.NC PDM-12 Persiapan Sosialisasi dan Advokasi Pembentukan Unit Layanan Disabilitas di Daerah  12 6397.QDB.850-114 Pelaksanaan Transisi PAUD-SD  12.1 6397.QDB.850-114 Pelaksanaan Transisi PAUD-SD  12.2 6397.QDB.850-114.KB PDM-09 Advokasi dan Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota  12.2 6397.QDB.850-114.KD PDM-09 Koordinasi dan Sosialisasi kebijakan dan penguatan MPLS Transisi PAUD-SD kepada Pokja Bunda PAUD  12.3 6397.QDB.850-114.KF PDM-09 Diseminasi surat pemberitahuan SPV PDM09 ke Dinas Pendidikan untuk advokasi transisi PAUD SD  12.4 6397.QDB.850-114.KG PDM-09 Advokasi Pemenuhan 8 Indikator Layanan Esensial Pengembangan Anak Usia	10.3	6397.QDB.750-116.MF	·
Pelaksanaan TKSI ke Satuan Pendidikan  10.6 6397.QDB.750-116.MK PDM-11 Pendampingan Pelaksanaan TKSI  11 6397.QDB.750-117 Pelaksanaan Transformasi Pendidikan Khusus  11.1 6397.QDB.750-117.NA PDM-12 Advokasi Kebijakan Layanan Pendidikan Inklusif kepada Pemerintah Daerah  11.2 6397.QDB.750-117.NB PDM-12 Pelaksanaan Advokasi Pemanfaatan Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif di Satuan Pendidikan  11.3 6397.QDB.750-117.NC PDM-12 Persiapan Sosialisasi dan Advokasi Pembentukan Unit Layanan Disabilitas di Daerah  12 6397.QDB.850-114 Pelaksanaan Transisi PAUD-SD  12.1 6397.QDB.850-114.KB PDM-09 Advokasi dan Pendampingan Kebijakan dan Produk Pembelajaran Transisi PAUD-SD kepada Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota  12.2 6397.QDB.850-114.KD PDM-09 Koordinasi dan Sosialisasi kebijakan dan penguatan MPLS Transisi PAUD-SD kepada Pokja Bunda PAUD  12.3 6397.QDB.850-114.KF PDM-09 Diseminasi surat pemberitahuan SPV PDM09 ke Dinas Pendidikan untuk advokasi transisi PAUD SD  12.4 6397.QDB.850-114.KG PDM-09 Advokasi Pemenuhan 8 Indikator Layanan Esensial Pengembangan Anak Usia	10.4	6397.QDB.750-116.MI	PDM-11 Semarak GSS
11.1 6397.QDB.750-117 Pelaksanaan Transformasi Pendidikan Khusus  11.1 6397.QDB.750-117.NA PDM-12 Advokasi Kebijakan Layanan Pendidikan Inklusif kepada Pemerintah Daerah  11.2 6397.QDB.750-117.NB PDM-12 Pelaksanaan Advokasi Pemanfaatan Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif di Satuan Pendidikan  11.3 6397.QDB.750-117.NC PDM-12 Persiapan Sosialisasi dan Advokasi Pembentukan Unit Layanan Disabilitas di Daerah  12 6397.QDB.850-114 Pelaksanaan Transisi PAUD-SD  12.1 6397.QDB.850-114.KB PDM-09 Advokasi dan Pendampingan Kebijakan dan Produk Pembelajaran Transisi PAUD-SD kepada Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota  12.2 6397.QDB.850-114.KD PDM-09 Koordinasi dan Sosialisasi kebijakan dan penguatan MPLS Transisi PAUD-SD kepada Pokja Bunda PAUD  12.3 6397.QDB.850-114.KF PDM-09 Diseminasi surat pemberitahuan SPV PDM09 ke Dinas Pendidikan untuk advokasi transisi PAUD SD  12.4 6397.QDB.850-114.KG PDM-09 Advokasi Pemenuhan 8 Indikator Layanan Esensial Pengembangan Anak Usia	10.5	6397.QDB.750-116.MJ	
Khusus  PDM-12 Advokasi Kebijakan Layanan Pendidikan Inklusif kepada Pemerintah Daerah  11.2 6397.QDB.750-117.NB PDM-12 Pelaksanaan Advokasi Pemanfaatan Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif di Satuan Pendidikan  11.3 6397.QDB.750-117.NC PDM-12 Persiapan Sosialisasi dan Advokasi Pembentukan Unit Layanan Disabilitas di Daerah  12 6397.QDB.850-114 Pelaksanaan Transisi PAUD-SD  12.1 6397.QDB.850-114.KB PDM-09 Advokasi dan Pendampingan Kebijakan dan Produk Pembelajaran Transisi PAUD-SD kepada Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota  12.2 6397.QDB.850-114.KD PDM-09 Koordinasi dan Sosialisasi kebijakan dan penguatan MPLS Transisi PAUD-SD kepada Pokja Bunda PAUD  12.3 6397.QDB.850-114.KF PDM-09 Diseminasi surat pemberitahuan SPV PDM09 ke Dinas Pendidikan untuk advokasi transisi PAUD SD  12.4 6397.QDB.850-114.KG PDM-09 Advokasi Pemenuhan 8 Indikator Layanan Esensial Pengembangan Anak Usia	10.6	6397.QDB.750-116.MK	PDM-11 Pendampingan Pelaksanaan TKSI
Pendidikan Inklusif kepada Pemerintah Daerah  11.2 6397.QDB.750-117.NB PDM-12 Pelaksanaan Advokasi Pemanfaatan Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif di Satuan Pendidikan  11.3 6397.QDB.750-117.NC PDM-12 Persiapan Sosialisasi dan Advokasi Pembentukan Unit Layanan Disabilitas di Daerah  12 6397.QDB.850-114 Pelaksanaan Transisi PAUD-SD  12.1 6397.QDB.850-114.KB PDM-09 Advokasi dan Pendampingan Kebijakan dan Produk Pembelajaran Transisi PAUD-SD kepada Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota  12.2 6397.QDB.850-114.KD PDM-09 Koordinasi dan Sosialisasi kebijakan dan penguatan MPLS Transisi PAUD-SD kepada Pokja Bunda PAUD  12.3 6397.QDB.850-114.KF PDM-09 Diseminasi surat pemberitahuan SPV PDM09 ke Dinas Pendidikan untuk advokasi transisi PAUD SD  12.4 6397.QDB.850-114.KG PDM-09 Advokasi Pemenuhan 8 Indikator Layanan Esensial Pengembangan Anak Usia	11	6397.QDB.750-117	
Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif di Satuan Pendidikan  11.3 6397.QDB.750-117.NC PDM-12 Persiapan Sosialisasi dan Advokasi Pembentukan Unit Layanan Disabilitas di Daerah  12 6397.QDB.850-114 Pelaksanaan Transisi PAUD-SD  12.1 6397.QDB.850-114.KB PDM-09 Advokasi dan Pendampingan Kebijakan dan Produk Pembelajaran Transisi PAUD-SD kepada Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota  12.2 6397.QDB.850-114.KD PDM-09 Koordinasi dan Sosialisasi kebijakan dan penguatan MPLS Transisi PAUD-SD kepada Pokja Bunda PAUD  12.3 6397.QDB.850-114.KF PDM-09 Diseminasi surat pemberitahuan SPV PDM09 ke Dinas Pendidikan untuk advokasi transisi PAUD SD  12.4 6397.QDB.850-114.KG PDM-09 Advokasi Pemenuhan 8 Indikator Layanan Esensial Pengembangan Anak Usia	11.1	6397.QDB.750-117.NA	Pendidikan Inklusif kepada Pemerintah
Pembentukan Unit Layanan Disabilitas di Daerah  12 6397.QDB.850-114 Pelaksanaan Transisi PAUD-SD  12.1 6397.QDB.850-114.KB PDM-09 Advokasi dan Pendampingan Kebijakan dan Produk Pembelajaran Transisi PAUD-SD kepada Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota  12.2 6397.QDB.850-114.KD PDM-09 Koordinasi dan Sosialisasi kebijakan dan penguatan MPLS Transisi PAUD-SD kepada Pokja Bunda PAUD  12.3 6397.QDB.850-114.KF PDM-09 Diseminasi surat pemberitahuan SPV PDM09 ke Dinas Pendidikan untuk advokasi transisi PAUD SD  12.4 6397.QDB.850-114.KG PDM-09 Advokasi Pemenuhan 8 Indikator Layanan Esensial Pengembangan Anak Usia	11.2	6397.QDB.750-117.NB	Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif di
12.1 6397.QDB.850-114.KB PDM-09 Advokasi dan Pendampingan Kebijakan dan Produk Pembelajaran Transisi PAUD-SD kepada Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota  12.2 6397.QDB.850-114.KD PDM-09 Koordinasi dan Sosialisasi kebijakan dan penguatan MPLS Transisi PAUD-SD kepada Pokja Bunda PAUD  12.3 6397.QDB.850-114.KF PDM-09 Diseminasi surat pemberitahuan SPV PDM09 ke Dinas Pendidikan untuk advokasi transisi PAUD SD  12.4 6397.QDB.850-114.KG PDM-09 Advokasi Pemenuhan 8 Indikator Layanan Esensial Pengembangan Anak Usia	11.3	6397.QDB.750-117.NC	Pembentukan Unit Layanan Disabilitas di
Kebijakan dan Produk Pembelajaran Transisi PAUD-SD kepada Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota  12.2 6397.QDB.850-114.KD PDM-09 Koordinasi dan Sosialisasi kebijakan dan penguatan MPLS Transisi PAUD-SD kepada Pokja Bunda PAUD  12.3 6397.QDB.850-114.KF PDM-09 Diseminasi surat pemberitahuan SPV PDM09 ke Dinas Pendidikan untuk advokasi transisi PAUD SD  12.4 6397.QDB.850-114.KG PDM-09 Advokasi Pemenuhan 8 Indikator Layanan Esensial Pengembangan Anak Usia	12	6397.QDB.850-114	Pelaksanaan Transisi PAUD-SD
dan penguatan MPLS Transisi PAUD-SD kepada Pokja Bunda PAUD  12.3 6397.QDB.850-114.KF PDM-09 Diseminasi surat pemberitahuan SPV PDM09 ke Dinas Pendidikan untuk advokasi transisi PAUD SD  12.4 6397.QDB.850-114.KG PDM-09 Advokasi Pemenuhan 8 Indikator Layanan Esensial Pengembangan Anak Usia	12.1	6397.QDB.850-114.KB	Kebijakan dan Produk Pembelajaran Transisi PAUD-SD kepada Dinas Pendidikan dan
SPV PDM09 ke Dinas Pendidikan untuk advokasi transisi PAUD SD  12.4 6397.QDB.850-114.KG PDM-09 Advokasi Pemenuhan 8 Indikator Layanan Esensial Pengembangan Anak Usia	12.2	6397.QDB.850-114.KD	dan penguatan MPLS Transisi PAUD-SD
Layanan Esensial Pengembangan Anak Usia	12.3	6397.QDB.850-114.KF	SPV PDM09 ke Dinas Pendidikan untuk
	12.4	6397.QDB.850-114.KG	Layanan Esensial Pengembangan Anak Usia

### C. Realisasi Anggaran

#### 1. Capaian Anggaran

Pagu anggaran BPMP Provinsi Sumatera Utara dalam DIPA tahun 2024 sebesar **Rp. 55.564.053.000.** Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar **Rp. 53.638.827.760** dengan persentase daya serap sebesar **96,54%**.

Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.

Berikut Realisasi anggaran BPMP Provinsi Sumatera Utara per program Kegiatan Tahun 2024.

Tabel 3.17 Realisasi anggaran per program Tahun 2024

No	Program Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Anggaran	%
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	30,150,088,000	30,070,674,557	99,74
2	Layanan Penjaminan	25,413,965,000	23,568,153,203	92,74

jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Total	55,564,053,000	53,638,827,760	96,54
Mutu	Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen			

#### 2. Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2024, BPMP Provinsi Sumatera Utara berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar **Rp846.712.000,-** dari pagu anggaran sebesar Rp55.564.053.000,- dengan capaian kinerja anggaran sebesar 103,97%. Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari:

- a. Penghematan biaya perjalanan dinas;
- b. Optimalisasi kegiatan dengan menggabungkan penyelenggaraan beberapa kegiatan.
- c. Perubahan bentuk kegiatan luring menjadi daring.
   Anggaran hasil efisiensi digunakan untuk penambahan pagu anggaran gaji yang sebelumnya minus.

Gambar 3.4 Efisiensi anggaran tahun 2024



## D. Kinerja Lain-lain

#### 1. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan pada BPMP Provinsi Sumatera Utara adalah bagian dari upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi berfokus pada perbaikan layanan publik melalui digitalisasi dan penyederhanaan proses layanan. Adapun langkahlangkah kerja yang telah dilakukan pada BPMP Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Kementerian sesuai dengan yang termuat dalam renstra BPMP Provinsi Sumatera Utara tahun 2020-2024 yaitu meliputi 6 (enam) area perubahan, sebagai berikut:

Tabel 3.18 Enam Area Perubahan

No	Area Perubahan	Indikator	Program Kegiatan
1	Manajemen Perubahan	Indeks Kepemimpinan Perubahan	<ul> <li>Pengembangan dan penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (reform)</li> <li>Pembentukan tim kerja RBI di lingkungan BPMP Provinsi Sumatera Utara</li> <li>Penguatan nilai integritas, perubahan pola pikir dan budaya kinerja</li> <li>Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan role model dengan dibentuknya tim agen perubahan di lingkungan BPMP Provinsi Sumatera Utara</li> <li>Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0;</li> </ul>
2	Penguatan Pengawasan	Maturitas SPIP	<ul> <li>Pembentukan tim SPI dan SPIP di lingkungan BPMP Provinsi Sumatera Utara</li> <li>Penyusunan rencana kerja SPI dan SPIP</li> <li>Penguatan Sistem Manajemen Konflik</li> </ul>
3	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	<ul> <li>Perencanaan terintegrasi dan lintas sektor (collaborative)</li> <li>Implementasi manajemen kinerja berorientasi hasil</li> </ul>
4	Penguatan Tata Laksana	Indeks Sistem  Pemerintah Berbasis  Elektronik	<ul> <li>Pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan</li> <li>Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital)</li> <li>Penyusunan Program Kerja</li> </ul>

		(SPBE)	Pengawasan dan Prosedur Operasional Standar (POS) Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan BPMP Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan di
5	Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	<ol> <li>Indeks         Profesionali         tas ASN</li> <li>Indeks         Merit         System</li> <li>Indeks Tata         Kelola         Manajemen         ASN</li> </ol>	<ul> <li>Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi</li> <li>Pengembangan Pegawai berbasis Kompetensi</li> <li>Assessment Pegawai</li> <li>Penanaman nilai integritas melalui penghargaan pegawai dengan kinerja terbaik</li> <li>Analisis Kebutuhan Pelatihan Pegawai</li> <li>Pemetaan Kompetensi Pegawai sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)</li> </ul>
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ol> <li>Indeks         Inovasi</li> <li>Indeks         Pelayanan         Publik</li> </ol>	<ul> <li>Penyusunan dokumen standar pelayanan</li> <li>Penyusunan alur layanan publik</li> <li>Mengembangkan budaya pelayanan prima</li> <li>Penguatan kompetensi petugas pelayanan publik</li> <li>Penilaian terhadap pelayanan melalui survei dan analisis kepuasan pelanggan</li> </ul>

Dalam rangka penguatan Program Kegiatan 6 (enam) area perubahan tersebut, BPMP Provinsi Sumatera Utara telah mengagendakan kegiatan sebagai berikut:

 Bimbingan Teknis Penguatan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK)

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta dari

masing-masing area perubahan dengan total peserta 32 orang yang terdiri dari Sekretariat ZI-WBK, area manajemen perubahan, area penataan tata laksana, area penataan sistem manajemen SDM, area penataan pengawasan, area penataan penguatan akuntabilitas kinerja, dan area peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan tanggal 13-14 September 2024 bertempat di Aula Sisingamangaraja XII Kampus I BPMP Provinsi Sumatera Utara

2. Penyusunan Program Kerja Pengawasan dan Prosedur Operasional Standar (POS) Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan BPMP Provinsi Sumatera Utara Kegiatan ini bertujuan dalam rangka penyusunan program kerja dan POS dalam pelaksanaan ZI-WBK di lingkungan BPMP Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan di Marianna Resort & Convention Tuktuk Samosir tanggal 24-27 Oktober 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang yang terdiri dari Sekretariat ZI-WBK, area manajemen perubahan, area penataan tata laksana, area penataan sistem manajemen SDM, area penataan pengawasan, area penataan penguatan akuntabilitas kinerja, dan area peningkatan kualitas pelayanan publik

#### 3. Rapat Tim Kerja ZI-WBK

Pertemuan antar tim kerja ZI-WBK senantiasa dilaksanakan sebagai bentuk komitmen terhadap program kerja dan laporan kegiatan dari masing-masing area perubahan

Melalui upaya-upaya ini diharapkan agar birokrasi lebih efisien, berintegritas, dan mampu mendukung program-program pendidikan yang berdampak luas bagi masyarakat.

#### 2. Informasi Capaian Kinerja Lainnya yang mendukung

Pada tahun 2024 terdapat capaian kinerja lainnya yang mendukung ketercapaian indikator kinerja BPMP Provinsi Sumatera Utara. Diantaranya ketercapaian terbitnya Surat Edaran Kepala Daerah terkait Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Dalam Hal pencapaian target kinerja tidak terlepas dari pendekatan yang dilakukan serta Pelaksanaan *Project Management Office* (PMO) yang rutin dilaksanakan setiap 2 bulan sekali oleh BPMP Provinsi Sumatera Utara. Melalui PMO terjalin komunikasi yang baik dengan Dinas Pendidikan maupun Stakeholder terkait lainnya dalam rangka percepatan sosialisasi kebijakan maupun program prioritas Kemendikbudristek. Selain berdampak baik bagi BPMP Provinsi Sumatera, kegiatan PMO juga berdampak positif bagi daerah sebagai wadah *sharing discussion* terkait arah kebijakan Kemendikbudristek di daerah.

#### 3. Inovasi

Pada tahun 2024, BPMP Provinsi Sumatera Utara melakukan inovasi:

- 1) Inovasi Pada Tim Kerja 01 Inovasi Dan Tranformasi Pembelajaran (ITP) Komunitas Belajar (Kombel) Tim Kerja 01 "Kombel Cendikia ITP" Aktivitas kombel ini dilaksanakan guna menganalisis setiap kegiatan yang ada pada PDM yang dilaksanakan oleh Tim Kerja 01, rapat persiapan dan rapat evaluasi kegiatan serta penyusunan laporan kegiatan. Inovasi ini berhasil dilaksanakan sehingga dapat mencapai target dan tujuan masing-masing PDM pada Tim Kerja 01.
- 2) Inovasi Tim Kerja 02 Publikasi dan Komunikasi BPMP Provinsi Sumatera Utara

#### 1. Upgrade visual web BPMP Provinsi Sumatera

Web sangat dibutuhkan bagi setiap instansi sebagai wajah untuk dipublikasikan dan diinformasikan ke dunia maya. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Utara memiliki alamat web berupa: https://bpmpprovsumut.kemdikbud.go.id/ menampilkan profil, data, publikasi, informasi, pelayanan, dan pengaduan. Masyarakat dapat mengakses Web BPMP Provinsi Sumatera Utara untuk mencari informasi yang dibutuhkannnya. Maka Web BPMP Provinsi Sumatera Utara selalu upgrade berita dan infromasi yang layak diakses oleh

masyarakat, bahkan mengupgrade visualisasi web berdasarkan warna dan gradasi sesuai dengan yang ada di logo Tutwuri Handayani, agar tampilan sama dengan Ditjen PAUD dan Dasmen.

## 2. Upgrade visualisasi dan konten 4 kali sehari di Instagram BPMP Provinsi Sumatera Utara

Instagram adalah platform media sosial yang berfokus pada berbagi foto dan video. Diluncurkan pada tahun 2010 oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger, Instagram memungkinkan pengguna untuk mengambil foto atau video, mengeditnya dengan berbagai filter, dan membagikannya kepada pengikut mereka atau ke seluruh pengguna Instagram.

Instagram BPMP Provinsi Sumatera Utara dengan alamat @bpmpprovsumut telah memposting 1.335 foto atau video, dengan pengikut berjumlah 11,1 ribu, dan mengikuti 507. Berita yang ditampilkan di Instgram BPMP Provinsi Sumatera Utara berisikan program pembelajaran yang terjadilinnya interaksi dan komunitas dari para pengguna yang menyukai , mengomentari, dan membagikan konten.

# 3. Publikasi konten video-video program PAUD dan Dasmen di Youtube BPMP Provinsi Sumatera Utara

YouTube adalah platform berbagi video yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah, menonton, dan berbagi berbagai jenis konten video. YouTube didirikan pada tahun 2005 oleh Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim, dan pada tahun 2006, YouTube diakuisisi oleh Google. Saat ini, YouTube merupakan salah satu situs web paling populer di dunia, digunakan oleh miliaran pengguna.

Video-video yang dipublikasikan di youtube BPMP Provinsi Sumatera Utara beralamat

www.youtube.com/@bpmpprovinsisumaterautara4149 dengan 1,42K subscribers, 73 video, 22,913 views, dan bergabung di youtube pada tanggal 12 Februari 2019

#### 4. Pengaktifan Facebook BPMP Provinsi Sumatera Utara

Facebook adalah platform media sosial yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi konten, dan membangun jejaring sosial secara daring. Platform ini diluncurkan pada 4 Februari 2004 oleh Mark Zuckerberg bersama beberapa rekannya di Universitas Harvard, seperti Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, dan Chris Hughes.

Facebook BPMP Provinsi Sumatera Utara menampilkan konten dan halaman (pages) untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai pendidikan pada alamat @BPMP Provinsi Sumatera Utara dengan rincian berupa: halaman, dan 833 pengikut.

#### 5. Pengaktifan TikTok BPMP Provinsi Sumatera Utara

TikTok adalah platform media sosial berbasis video pendek yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan menonton video berdurasi singkat. Aplikasi ini sangat populer untuk konten kreatif, hiburan, tantangan (challenges), tarian, komedi, hingga edukasi. TikTok dikembangkan oleh perusahaan teknologi asal Tiongkok, ByteDance, dan diluncurkan pada September 2016.

Tiktok BPMP Provinsi Sumatera berisikan video yang terkait dengan pendidikan dan berdurasi rata-rata 3 menit, dengan tujuan menyampaikan informasi mengenai pendidikan kepada masyarakat. Tiktok harus memiliki konten yang mudah dicerna penyampaian informasinya, sehingga masyarakat dapat mengakses dan mencari sumber informasi yang terpercaya.

Dokumen video-video yang menyampaikan informasi juga di upload di tiktok BPMP Provinsi Sumatera Utara dengan alamat https://www.tiktok.com/@bpmpprovsumut dengan rincian: 32 mengikuti, 137 pengikut, dan 427 suka.

#### 6. Podcast BPMP Provinsi Sumatera Utara

Podcast adalah bentuk konten audio digital yang dapat didengarkan secara daring atau diunduh untuk didengarkan kapan saja. Podcast disajikan dalam bentuk seri atau episode dengan tema tertentu, seperti pendidikan, hiburan, wawancara, atau cerita fiksi.

Podcast BPMP Provinsi Sumatera menampilkan dalam bentuk video audio yang dapat diakses di youtube BPMP Provinsi Sumatera Utara, tentunya yang terkait dengan pendidikan dan pengetahuan yang dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat. Podcast BPMP Provinsi Sumatera Utara diberi nama "Cerdik (Cerita Pendidikan) Podcast".

Pada tahun 2024 sudah ditayangkan 2 podcast yang disampaikan oleh Kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara mengenai Mengenal BPMP Provinsi Sumatera Utara, serta Podcast bersama Ketua Tim Kerja 01 dan Ketua Tim Kerja 04 BPMP Provinsi Sumatera Utara mengenai Transformasi Pembelajaran dan Perencanaan Berbasis Data.

#### 3) Inovasi Tim Kerja 04

## Microsite Aplikasi Dasbor Akses Dan Komparasi Rapor Pendidikan Satuan Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

BPMP sebagai UPT dari Kemendikbudristek yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usis Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dan sesuai dengan salah satu fungsi balai yakni melakukan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, maka tim kerja 04 (Pendataan dan Penjaminan Mutu Pendidikan) merancang pendampingan baik itu dalam bentuk sosialisasi, pembimbingan dan advokasi terhadap satuan-satuan pendidikan dan memprioritaskan satuan pendidikan yang masih rendah tingkat kualitas capaian akses rapor pendidikan satuan pendidikan yang masih sangat rendah.

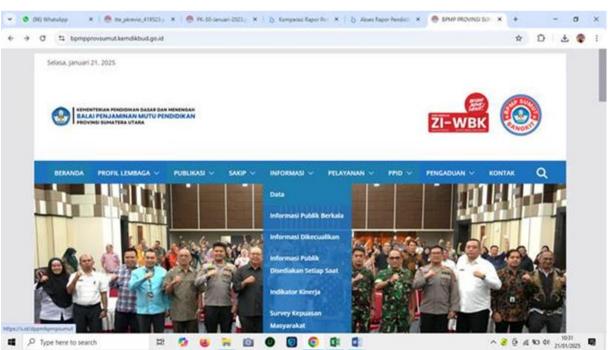
Berdasarkan masalah diatas maka Tim Kerja 04 BPMP Provinsi Sumatera Utara membuat suatu aplikasi Dasbor Akses dan Komparasi Rapor Pendidikan Satuan Pendidikan sebagai informasi capaian capaian rapor pendidikan untuk semua tingkat satuan pendidikan, dengan tujuan:

a. Terjadinya peningkatan yang signifikan terhadap kualitas capaian

- login dan unduh rapor pendidikan setiap jenjang satuan pendidikan yang erat kaitannya dengan target capaian UPT;
- Sebagai informasi tentang capaian yang telah dilakukan Tim Kerja 04 dalam hal gambaran peningkatan capaian akses rapor pendidikan di wilayah provinsi Sumatera Utara;
- c. Sebagai informasi akses Rapor Pendidikan untuk Pemangku Kepentingan Rapor Pendidikan Satuan Pendidikan;
- d. Sebagai bahan evaluasi untuk Dinas Pendidikan dalam memantau perkembangan akses Rapor Satuan Pendidikan di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Panduan menuju Microsite Aplikasi Dasbor Akses dan Komparasi Rapor Pendidikan Satuan Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara oleh BPMP Provinsi Sumatera adalah sebagai berikut:

- 1. Ketik laman website BPMP Provinsi Sumatera Utara <a href="https://bpmpprovsumut.kemdikbud.go.id/">https://bpmpprovsumut.kemdikbud.go.id/</a>
- 2. Klik menu "Informasi"
- 3. Klik Sub menu "Data"

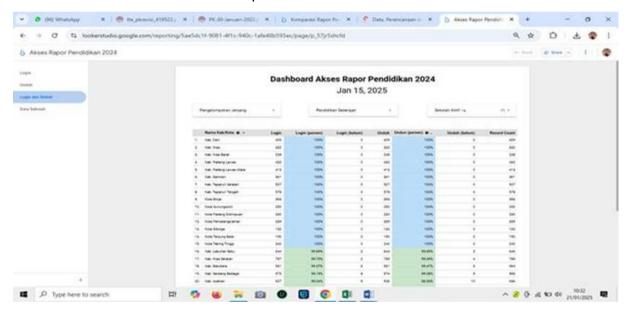


Gambar 3.5 Laman BPMP Provinsi Sumatera Utara

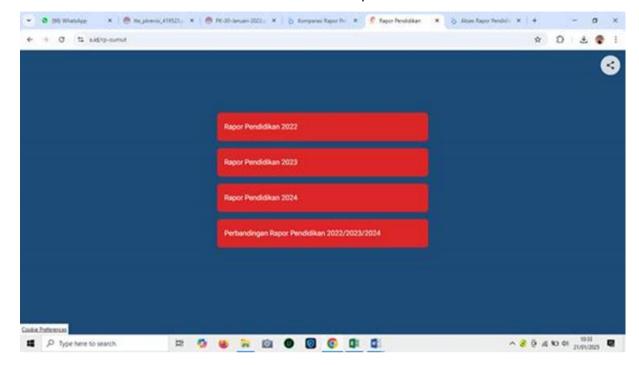
#### Gambar 3.6 Microsite data



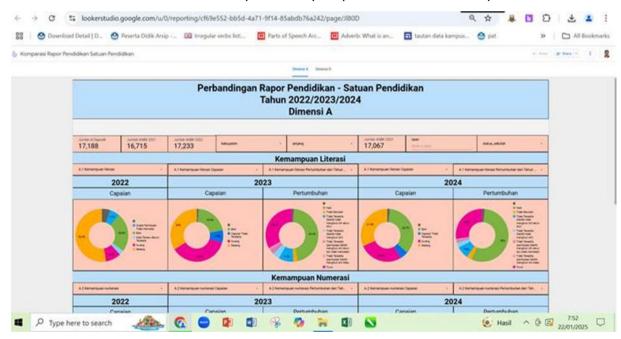
Gambar 3.7 Dasbor Rapor Pendidikan Provinsi Sumatera Utara



Gambar 3.8 Microsite Rapor Pendidikan



#### Gambar 3.9 Dasbor komparasi rapor pendidikan satuan pendidikan



#### 4) Festival Literasi dan Numerasi

Festival ini merupakan wadah bagi institusi pendidikan dan berbagai lembaga untuk berbagi pengalaman, ide, serta program inovatif dalam upaya meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi di kalangan pelajar dan masyarakat umum.

Pelaksanaan Festival Literasi dan Numerasi ini dilaksanakan di Kampus I BPMP Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 3-6 November 2024. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk eksplorasi dunia literasi dan numerasi dengan cara yang lebih seru dengan diadakannya lombalomba literasi numerasi yang kreatif dan menantang.

Kegiatan ini melibatkan banyak pihak diantaranya siswa, guru, universitas, serta komunitas pegiat literasi. Dengan banyaknya pihak yang terlibat diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat kerja sama antara berbagai institusi pendidikan di Sumatera Utara serta mendorong peningkatan mutu pendidikan bagi generasi muda dalam membangun generasi yang lebih cerdas, kreatif, dan berdaya saing.



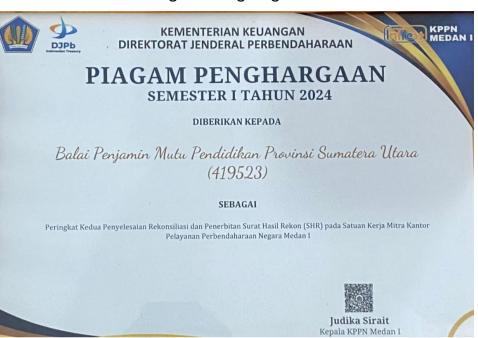
Gambar 3.10 Pelaksanaan Festival Literasi Numerasi

#### 4. Penghargaan

Pada tahun 2024, BPMP Provinsi Sumatera Utara mendapatkan penghargaan:

1. Peringkat Kedua Penyelesaian Rekonsiliasi dan Penerbitan Surat Hasil Rekon (SHR) pada Satuan Kerja Mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan 1

Gambar 3.11 Piagam Penghargaan dari KPPN Medan 1



 Penghargaan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai UPT Dedikatif kategori Dampak Advokasi dan Fasilitasi

Gambar 3.12 Piagam Penghargaan dari Mendikbudristek RI



#### 5. Program Crosscutting/Collaborative

Pada tahun 2020-2024 yang masih berlaku, BPMP Provinsi Sumatera Utara melakukan program *crosscutting/collaborative*, sebagai berikut:

Tabel 3.19 Matriks pelaksanaan kerja sama/kemitraan BPMP Provinsi Sumatera Utara

No	Jenis Naskah	Judul Naskah	Nama Instansi	Waktu	Rencana Kerja	Pelaksanaan Kerja Sama
1	Nota Kesepahaman	Kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dengan Yayasan Bhakti Tanoto tentang Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar di Kab. Karo	Yayasan Bhakti Tanoto	27 Des 2021 s.d 31 Des 2024	Peningka tan Kualitas Pendidik an Dasar di Kab. Karo	Ruang lingkup kerjasama meliputi:  a. bidang pendidikan dan pelatihan  b. bidang penelitian dan pengembangan  c. pengembangan potensi daerah di bidang pendidikan  d. penyebarluasan praktik baik
2	Perjanjian Kerja Sama	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kab. Dairi dan Ikatan Guru Indonesia (IGI) tentang Pengembang an Profesi Guru	Ikatan Guru Indonesi a (IGI)	08 Okt 2024 s.d 31 Des 2025	Pengem bangan Profesi Guru melali Impleme ntasi Merdeka Belajar	Pemberian bantuan teknis kepada guru dan kepala sekolah di Kab. Dairi

3	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahama n Bersama antara Dinas Pendidikan Kab. Labuhan Batu dengan Bank Mega Cab. Rantau Parapat terkait Peningkatan mutu pendidikan melalui program Merdeka Belajar di Kab. Labuhan Batu	Bank Mega Cab. Rantau Parapat	11 Okt 2024 s.d 31 Des 2024	Peningka tan mutu pendidik an melalui program Merdeka Belajar di Kab. Labuhan Batu	Meningkatkan mutu pendidikan melalui Program Merdeka Belajar di Kab. Lab. Batu melalui beberapa program diantaranya: literasi dan numerasi, pendidikan karakter, penanganan anak tidak sekolah, transisis paud yang menyenangkan, tranformasi pendidikan dll
4	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahama n Bersama antara Dinas Pendidikan Kab. Labuhan Batu dengan CV. Anungerah Bersama Cahaya (ABC) tentang peningkatan literasi dan numerasi di Kab. Labuhan Batu	CV. Anunger ah Bersama Cahaya (ABC)	11 Okt 2024 s.d 31 Des 2024	peningka tan literasi dan numerasi di Kab. Labuhan Batu	Meningkatkan literasi dan numerasi melalui Program Merdeka Belajar di Kab. Lab. Batu melalui beberapa program diantaranya: kegiatan pemberian bantuan/donasi buku bacaan, lokakarya, sosialisasi, pelatihan literasi dan numerasi, kegiatan bimtek, dan pendampingan terkait literasi dan numerasi
5	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahama	Forum Masyara	11 Okt 2024	peningka tan	Meningkatkan literasi dan
		n Bersama	kat	s.d 31	literasi	numerasi melalui

		ı D:		<b>D</b>		D M 11
		antara Dinas Pendidikan Kab. Labuhan Batu denganForum Masyarakat Literasi Indonesia (Formalindo) tentang peningkatan literasi dan numerasi di Kab. Labuhan Batu	Literasi Indonesi a (Formalin do)	Des 2024	dan numerasi di Kab. Labuhan Batu	Program Merdeka Belajar di Kab. Lab. Batu melalui beberapa program diantaranya: kegiatan pemberian bantuan/donasi buku bacaan, lokakarya, sosialisasi, pelatihan literasi dan numerasi, kegiatan bimtek, dan pendampingan terkait literasi dan numerasi
6	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahama n Bersama antara Dinas Pendidikan Kab. Labuhan Batu dengan CV. Anungerah Bersama Cahaya (ABC) tentang peningkatan literasi dan numerasi di Kab. Labuhan Batu Utara	CV. Anunger ah Bersama Cahaya (ABC)	11 Okt 2024 s.d 31 Des 2024	peningka tan literasi dan numerasi di Kab. Labuhan Batu Utara	Meningkatkan literasi dan numerasi melalui Program Merdeka Belajar di Kab. Lab. Batu Utara melalui beberapa program diantaranya: kegiatan pemberian bantuan/donasi buku bacaan, lokakarya, sosialisasi, pelatihan literasi dan numerasi, kegiatan bimtek, dan pendampingan terkait literasi dan numerasi

7	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahama n Bersama antara Dinas Pendidikan Kab. Labuhan Batu denganForum Masyarakat Literasi Indonesia (Formalindo) tentang peningkatan literasi dan numerasi di Kab. Labuhan Batu Utara	Forum Masyara kat Literasi Indonesi a (Formalin do)	11 Okt 2024 s.d 31 Des 2024	peningka tan literasi dan numerasi di Kab. Labuhan Batu Utara	Meningkatkan literasi dan numerasi melalui Program Merdeka Belajar di Kab. Lab. Batu Utara melalui beberapa program diantaranya: kegiatan pemberian bantuan/donasi buku bacaan, lokakarya, sosialisasi, pelatihan literasi dan numerasi, kegiatan bimtek, dan pendampingan terkait literasi dan numerasi
8	Perjanjian Kerja Sama	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pendidikan Kota Binjai dan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tentang Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan bagi guru agama islam tahun 2024	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universit as Islam Negeri Sumater a Utara	19 Juni 2024 s.d 19 Juni 2026	Pelaksan aan Pendidik an Profesi Guru dalam jabatan bagi guru agama islam di Kota Binjai tahun 2024	Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam di Kota Binjai

9	Nota Kesepahaman	Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Binjai dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan kegiatan pengembang an lainnya	Universit as Islam Negeri Sumater a Utara Medan	19 Juni 2024 s.d 19 Juni 2026	Pendidik an, Penelitia n, Pengabdi an Masyara kat dan kegiatan pengem bangan lainnya	Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan Kegiatan Pengembangan Lainnya dalam rangka implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
---	---------------------	--	--	---	---	---

### **BABIV**

### **Penutup**

Selama tahun 2024, BPMP Provinsi Sumatera Utara berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan:

#### a. Capaian Kinerja

Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 secara keseluruhan dinyatakan berhasil karena dari 4 (empat) IKK yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 seluruh indikator kinerja program dinyatakan berhasil dicapai.

#### b. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan BPMP Provinsi Sumatera pada umumnya dapat tercapai tidak terlepas dari dukungan capaian kinerja di tahun 2024 dengan penggunaan angggaran sebesar Rp. 53.638.818.898,- atau 96,54% dari total pagu sebesar Rp. 55.564.053.000;-

Rp. 55.564.053.000,
Rp. 53.638.818.898,
Pagu

96,54%

Realisasi

Grafik 4.1 Kinerja Keuangan BPMP Provinsi Sumatera Utara

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- Pentingnya evaluasi internal dalam proses implementasi SAKIP BPMP Provinsi Sumatera;
- 2. Mengoptimalkan penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja dan sasaran kegiatan;
- Tindak lanjut dan mitigasi risiko terhadap pengukuran capaian kinerja dilakukan lebih dini sehingga dapat meningkatkan kualitas pencapaian program kerja.

Seiring dengan selesainya periode Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2020-2024, dapat dikatakan bahwa Kementerian/Eselon 1/Unit Kerja telah melaksanakan program kegiatan berdasarkan target/sasaran kinerja yang ditetapkan dengan optimal. Selanjutnya kita akan memasuki periode arah dan kebijakan baru, yaitu Renstra Tahun 2025-2029, dimana mengacu kepada Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Arah kebijakan baru tersebut tentunya akan memiliki program, target, sasaran kinerja dan anggaran yang baru dan mendukung peningkatan kualitas bidang pendidikan.

Berikut gambaran arah dan kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk periode Renstra tahun 2025-2029 yang menjadi landasan bagi BPMP Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya:

- A. Pendidikan bermutu untuk semua, dimana hal ini bisa dibagi menjadi dua bagian yaitu:
  - Pendidikan bermutu yang meliputi pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai, penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan kompeten dan sejahtera, lingkungan sosial budaya yang mendukung dan pembelajaran adaptif dan bermakna;

- 2) Pendidikan untuk semua yang meliputi penyediaan layanan pendidikan yang merata, pembiayaan pendidikan afirmatif, layanan pendidikan inklusif dan pengembangan talenta unggul.
- B. Program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang erat kaitannya dengan tugas dan fungsi BPMP Provinsi Sumatera Utara antara lain:
  - 1) Penguatan pendidikan karakter;
    - Penanaman karakter 7 kebiasaan anak Indonesia hebat;
    - Makan bergizi gratis dan penguatan usaha kesehatan sekolah (UKS).
  - 2) Wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan :
    - Perluasan akses 1 tahun pra SD;
    - Perluasan akses pendidikan menengah;
    - Akselerasi penanganan anak tidak sekolah (ATS);
    - Penguatan pendidikan nonformal dan informal, antara lain dengan melakukan afirmasi pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, rumah belajar, relawan mengajar, PAUD dan pendidikan jarak jauh.
  - 3) Pengembangan talenta dan prestasi serta penguatan pendidikan literasi, numerasi dan sains teknologi:
    - Pendidikan matematika, sains, teknologi sejak usia dini;
    - Peningkatan kecakapan literasi.
  - 4) Pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.
    - Renovasi sekolah.
  - C. Program Peningkatan karakter dan mutu pendidikan.
    - Selain program prioritas, BPMP Provinsi Sumatera Utara selaku UPT Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, menyelenggarakan program program yang berfokus pada peningkatan karakter dan mutu pendidikan antara lain
    - 1) Pendampingan Kurikulum Nasional.

Peningkatan pembelajaran *deep learning* kemampuan berpikir kritis, berkolaborasi, berinovasi, dan memiliki keterampilan yang relevan untuk masa depan melalui pembelajaran coding dan kecerdasan buatan (AI).

- 2) Transformasi digital untuk pembelajaran
  - Pemanfaatan TIK dalam pembelajaran dan peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia melalui perbaikan sistem pembelajaran serta penggunaan teknologi.
- Penguatan dan peningkatan capaian literasi dan numerasi.
   Penguatan khusus pada satuan pendidikan dengan capaian literasi dan numerasi di bawah kompetensi minimum.
- 4) Penguatan kapasitas PAUD dan SD kelas awal.
  Membangun fondasi anak agar memiliki karakter dan pribadi yang kuat dalam kegiatan sehari-hari.
- 5) Gerakan sekolah sehat
  - Penanaman karakter melalui pembiasaan pola hidup sehat dan bersih yang penerapannya dilaksanakan di satuan pendidikan
- 6) Penerapan perencanaan berbasis data satuan pendidikan.
  - Rapor Pendidikan menjadi sumber data utama untuk memahami kondisi layanan pendidikan dan menjadi dasar dalam menyusun perencanaan satuan pendidikan.

#### Lampiran Perjanjian Kinerja



#### Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara Dengan Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tajuddin Idris, S.Si., M.T

Jabatan : Kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Iwan Syahril

labatan : Direktur lenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.



Medan, 5 November 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala BPMP Provinsi Sumatera

Tajuddin Idris, S.Si., M.T





hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya mutu	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya		3.92
pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	%	52.95
[SK 2] Meningkatnya tata	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	Predikat	А
kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA- K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	Nilai	94.50

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp 30.150.088.000
2	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp 25.413.965.000
		Total Anggaran	Rp 55.564.053.000







Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala BPMP Provinsi Sumatera

Tajuddin Idris, S.Si., M.T





	Pernyataan	Check List		
	Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	V		
	2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	□ <b>∠</b>		
	3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai			
Format	4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan			
	5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan			
	6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	V		
	Laporan kinerja disusun oleh tim yang bentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja	□ <b>Z</b>		
72	Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai	V		
Mekanisme Penyusunan	3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusun laporan kinerja			
	4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja			
•	5. Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya	Ū∕		
	Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja	W		
	2. Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana stategis	V		
	Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai			
	4. IKSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja	<b>□</b> ⁄		
	5. Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai			
Substansi	6. Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun- tahun sebelumnya dan target akhir Renstra	V		
	7. Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/ hambatan dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator kinerja	V		
	8. Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan	V		
	9. IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran	<b>₩</b>		
	10. IKSS/IKP/IKK telah SMART	IJ∕		

#### Pernyataan Telah Direviu BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

Kami telah mereviu laporan kinerja BPMP Provinsi Sumatera Utara untuk tahun anggaran 2024 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen BPMP Provinsi Sumatera Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Medan, 30 Januari 2025 Ketua Tim Reviu,

Bastian Derajat Pulungan, S.T., M.Si. NIP 197007162003121002